



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa danau merupakan bagian dari ekosistem, sumber daya air, sumber air yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, budaya, dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia;
 - b. bahwa kondisi beberapa danau di Indonesia saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi/sedimentasi, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau, perlu dilakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan secara terpadu melalui penyelamatan danau prioritas nasional;

d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Danau adalah wadah Air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
4. Danau Prioritas Nasional adalah Danau yang memenuhi kriteria sebagai Danau Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.

5. Penyelamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
6. Daerah Tangkapan Air Danau adalah suatu wilayah daratan yang menampung dan menyimpan Air dari curah hujan dan mengalirkannya ke Danau secara langsung atau melalui sungai yang bermuara ke Danau.
7. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan Danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung Danau, fasilitas publik, masyarakat, dan kepentingan aspek lingkungan.
8. Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional adalah wadah koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Pemangku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, filantropi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka percepatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan 15 (lima belas) Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat, Danau Kerinci di Provinsi Jambi, Danau Rawa Danau di Provinsi Banten, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, Danau Batur di Provinsi Bali, Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat, Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Provinsi Papua.

(2) Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penetapan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau, kerusakan Sempadan Danau, kerusakan badan Air Danau, pengurangan volume tampungan Danau, pengurangan luas Danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas Air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.
 - b. memiliki nilai strategis ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c. tercantum dalam salah satu dokumen perencanaan pembangunan, rencana induk, dan/atau bentuk dokumen teknis lainnya di sektor Air dan/atau Danau.

Pasal 4

Penyelamatan Danau Prioritas Nasional didasarkan pada arah kebijakan berupa:

- a. mencegah dan menanggulangi kerusakan Ekosistem Danau Prioritas Nasional;
- b. memulihkan fungsi dan memelihara Ekosistem Danau Prioritas Nasional; dan
- c. memanfaatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. memanfaatkan Danau Prioritas Nasional dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan.

Pasal 5

Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagai berikut:

- a. pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam penataan ruang;
- b. pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran;
- c. penyelamatan Ekosistem perairan, Ekosistem sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau;
- d. penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan basis data dan informasi; dan
- e. pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran Pemangku Kepentingan.

Pasal 6

- (1) Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan ke dalam program, kegiatan, sasaran, target capaian, dan penanggung jawab, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk masing-masing Danau Prioritas Nasional dan ditetapkan untuk periode 4 (empat) tahun.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 8

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat; dan
- c. Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:
 - a. memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
 - b. menyampaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua
merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.
 - b. Wakil ketua
merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 - c. Ketua harian
merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - d. Wakil ketua harian I
merangkap anggota : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - e. Wakil ketua harian II
merangkap anggota : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - f. Anggota:
 - 1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 3) Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - 5) Menteri Pertanian;
 - 6) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 6) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 7) Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 8) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 9) Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 10) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 11) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 12) Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 13) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 14) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
- 15) Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 10

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sesuai dengan kewenangannya bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam:
 - a. melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi terhadap:
 - 1) perencanaan dan penganggaran strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - 2) pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - 3) pemantauan dan evaluasi strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
 - 4) pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - b. merumuskan laporan pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional untuk disampaikan kepada Dewan Pengarah.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat dapat berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/ kota serta Pemangku Kepentingan.

Pasal 11

Menteri selaku Ketua Harian menetapkan susunan keanggotaan, tugas serta mekanisme dan tata kerja Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat.

Pasal 12

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sesuai dengan kewenangannya bertugas:
- a. melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi tingkat daerah terhadap:
 - 1) perencanaan dan penganggaran strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - 2) pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - 3) pemantauan dan evaluasi strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
 - 4) pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - b. merumuskan laporan pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional untuk disampaikan kepada Dewan Pengarah.

(2) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Pelaksanaan tugas Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah Danau Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Pemangku Kepentingan.

Pasal 13

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan susunan keanggotaan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki lembaga pengelola Danau, maka dapat bertindak sebagai Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.

Pasal 14

- (1) Menteri selaku Ketua Harian mengoordinasikan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat dan tingkat daerah.
- (2) Ketentuan mengenai hubungan kerja antara Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat dan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Menteri selaku Ketua Harian mengatur lebih lanjut mengenai koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 16

- (1) Menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, penguatan koordinasi, dan jejaring dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 17

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan kepada Pemangku Kepentingan untuk terlibat dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi.

Pasal 18

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah melaporkan hasil koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagai capaian pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b kepada Gubernur atau Bupati/Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku Ketua Harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat melaporkan hasil koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagai capaian pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Menteri selaku Ketua Harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri selaku Ketua Harian melaporkan hasil koordinasi capaian pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Ketua Dewan Pengarah.
- (5) Ketua Dewan Pengarah melaporkan hasil capaian pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

Pendanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kegiatan penyelamatan 15 (lima belas) Danau yang telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pasal 21

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Shakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL

STRATEGI PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL

1. DANAU TOBA

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Belum terkendalinya kegiatan pemanfaatan ruang Danau | 1.1. | Optimalisasi penataan ruang kawasan Danau | Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan Danau | Tersusun dan terlaksananya rencana rinci tata ruang Danau | Ditetapkannya rencana rinci tata ruang Danau | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pemda Prov. Sumatera Utara), Kementerian | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kementerian Parekraf/ |

Lingkungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|----------|------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Otorita | Baparekraf), Pemda Prov. Sumatera Utara |

Pengelola ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba | |
| | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP), Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Sumatera Utara |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|--|--|---|---|----------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan, dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Sumatera Utara | Prov. Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Pemda Prov. Sumatera Utara |

Strategi 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--------------------------------------|---------|--------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. | Pengelolaan kualitas Air | Pemantauan kualitas Air | Tersedianya data dan informasi kualitas Air bagi acuan pengelolaan | Dilaksanakannya pemantauan kualitas Air secara berkala | Pemda Prov. Sumatera Utara, Perum Jasa Tirta | Kementerian LHK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas |
| | | | | Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas Air | Tersedianya sarana dan prasarana pemantauan kualitas Air yang baik | Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas Air | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kementerian Dikbudristek), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), LIPI, Kementerian PUPR, | Kementerian LHK, Universitas |

Pemda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | Pemda Prov. Sumatera Utara | |
| | | 3.2. Pengendalian pencemaran Air dari kegiatan budi daya perikanan dengan keramba jaring apung di Danau | Kajian/peng-hitungan daya tampung dan alokasi beban pencemaran Air Danau | Tersedianya acuan pemanfaatan budi daya perikanan dengan keramba jaring apung di danau | Dilaksanakannya penghitungan daya tampung dan alokasi beban pencemaran Air di Danau | Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, LIPI, Universitas |
| | | | Penertiban budi daya ikan dengan keramba jaring apung di Danau | Tertibnya budi daya ikan dengan keramba jaring apung di Danau sesuai daya dukung dan daya tampung | Produksi budi daya perikanan dengan keramba jaring apung menjadi 10.000 ton ikan/tahun (daya dukung maksimum) | Kementerian KP, Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim dan Investasi), LIPI, Badan |

Koordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas |
| | | 3.3. | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembinaan dan pengawasan izin pengelolaan limbah di Danau | Meningkatnya ketertiban dan ketaatan pengelolaan limbah di Danau | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin pengelolaan limbah di Danau secara intensif | Pemda Prov. Sumatera Utara Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, Pemda Prov. Sumatera Utara |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Pelaku Usaha |
| | | | Pembersihan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Dilaksanakannya pembersihan eceng gondok | Kementerian PUPR | Pelaku Usaha |
| | | 3.4. | Pengendalian pencemaran Air dari kegiatan pertanian dan peternakan | Pembinaan, penyuluhan, dan fasilitasi pertanian organik (termasuk pengadaan unit pengolahan pupuk | Menurunnya beban pencemaran Air dari kegiatan pertanian ke sungai/Danau di | Terlaksananya pembinaan, penyuluhan, dan fasilitasi pertanian organik dan | Kementerian Pertanian (Kementan), Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas |

organik/ ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-9-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | organik/UPPO) dan <i>System Rice Intensification</i> (SRI) yang ramah lingkungan | Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau | <i>System Rice Intensification</i> (SRI) yang ramah lingkungan | Sumatera Utara | |
| | | | Pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida | Menurunnya beban pencemaran Air dari kegiatan pertanian ke sungai/Danau di DTA Danau | Terlaksananya pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida | Kementan, Pemda Prov. Sumatera Utara | Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas, Pelaku Usaha, Koperasi |
| | | | Pembangunan drainase irigasi yang terpisah dari drainase limbah | Menurunnya beban pencemaran Air dari kegiatan pertanian ke sungai/Danau di DTA Danau | Terlaksananya pembangunan drainase irigasi yang terpisah dari drainase limbah | Kementan, Pemda Prov. Sumatera Utara | Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas, Pelaku Usaha |

4. Adanya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 4. | Adanya material padat/sedimen yang masuk ke Danau | 3.5. | Pengendalian sedimentasi | Pembangunan sarana prasarana pengendali sedimen di Danau | Terkendalnya sedimen yang masuk ke Danau | Terbangunnya bangunan pengendali sedimen | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Sumatera Utara |
| 5. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.6. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Pembudi daya dan penebaran bibit ikan spesies endemik Danau | Terwujudnya pelestarian ikan spesies endemik perairan Danau | Jumlah ikan spesies endemik yang meningkat | Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, LIPI, Universitas |
| 6. | Penurunan debit Air Danau | 3.7. | Pengaturan debit Air Danau | Kajian debit dan neraca Air | Tersedianya data sebagai acuan pengaturan pengelolaan Air | Terlaksananya kajian debit dan neraca Air | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemda Prov. Sumatera Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten (DPRD |

Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|---|---------|--|---|---|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | | Provinsi dan Kabupaten), Universitas | |
| | | | Pengembalian kapasitas dan fungsi sungai | Meningkatnya debit Air dengan tetap memperhitungkan kebutuhan keberlanjutan Ekosistem | Terlaksananya pengembalian kapasitas dan fungsi sungai | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sumatera Utara | | |
| 7. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak pada pencemaran Air/kerusakan Ekosistem Danau | 3.8. | Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai dengan peraturan yang berlaku | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Sumatera Utara, Pelaku Usaha |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pembangunan <i>greenbelt</i> dengan penanaman vegetasi di sekeliling Danau dan pengawasan pemanfaatan kawasan | Terjaganya kawasan Danau | Terlaksananya pembangunan <i>greenbelt</i> dan pengawasan pemanfaatan kawasan Sempadan Danau | Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas | Pemda Prov. Sumatera Utara, Kepolisian RI, Pelaku Usaha |
| | | | Pembangunan jalan di sekeliling Danau (jalan lingkaran Danau/ <i>roadbelt</i>) | Terjaganya batas keliling Danau | Terlaksananya pembangunan jalan lingkaran Danau (<i>roadbelt</i>) | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Sumatera Utara |
| | | | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Pelaku Usaha |

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | dan persampahan | | |
| 8. | Banyaknya sampah di Danau dan sekitarnya | 3.9. Pengelolaan sampah | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | Terkelolanya sampah | Tersedianya 35 <i>bin container</i> , 35 truk amrol, serta fasilitas teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang memperhatikan Ekosistem | Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Pelaku Usaha |
| 9. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimen | 3.10. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) | RHL vegetatif dengan penanaman tanaman lokal/endemik | Pemulihan lahan kritis dan mempertahankan luas hutan minimal 30% Daerah Tangkapan Air | Terlaksananya RHL dengan tanaman lokal/endemik pada lahan kritis | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara | Pelaku Usaha |

Pembuatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pembuatan hutan rakyat dan bantuan bibit tanaman hutan kepada masyarakat | Pemulihan lahan kritis dan mempertahankan luas hutan minimal 30% Daerah Tangkapan Air | Terlaksananya pembuatan hutan rakyat dan bantuan bibit tanaman hutan kepada masyarakat | Kementerian LHK, Pemda Sumatera Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT), Pelaku Usaha |
| | | | Pembinaan alih mata pencaharian penambang pertambangan batuan di sekitar Danau | Terwujudnya masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang tidak merusak lingkungan | Terlaksananya pembinaan alih mata pencaharian penambang pertambangan batuan di sekitar Danau | Pemda Sumatera Utara | Kementerian DPDTT, Pemda Sumatera Utara, Pelaku Usaha |
| | | | RHL sipil teknis melalui pembuatan | Turunnya laju erosi di kawasan Danau | Terlaksananya RHL sipil teknis melalui | Pemda Sumatera Utara | Universitas, Pelaku Usaha |

terasering ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | terasering, <i>gully plug</i> , turap/beronjong pelindung tebing, dam penahan/pengendali | | pembuatan terasering, <i>gully plug</i> , turap/beronjong pelindung tebing, dam penahan/pengendali | | |
| | | | Pembentukan, pembinaan dan penggiatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) | Berkurangnya kebakaran hutan yang menambah luasan lahan kritis | Terlaksananya pembentukan, pembinaan, dan penggiatan kelembagaan MPA | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara | Kepolisian RI, Pelaku Usaha |
| | | | Pemulihan lahan kritis melalui perbaikan secara <i>contour-cropping</i> | Berkurangnya lahan kritis, erosi, dan banjir | Terlaksananya pemulihan lahan kritis secara <i>contour-cropping</i> | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara | Universitas |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembangunan tanggul, pengendali sedimen, embung, dan dam parit | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan | Terlaksananya pembangunan tanggul, pengendali sedimen, embung, dan dam parit | Kementerian PUPR, Pelaku Usaha | Kementerian LHK, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pemda Prov. Sumatera Utara |
| 10. | Menurunnya keanekaragaman hayati di Daerah Tangkapan Air | 3.11. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Penanaman dan pembudi dayaan flora endemik, serta pembudi dayaan fauna endemik Daerah Tangkapan Air Danau | Lestarnya spesies endemik di Daerah Tangkapan Air Danau | Penanaman dan pembudi dayaan flora endemik, serta pembudi dayaan fauna endemik Daerah Tangkapan Air Danau | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara | Universitas, LIPI |
| 11. | Pencemaran limbah dari berbagai kegiatan | 3.12. | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai | Penghitungan daya tampung beban pencemaran Air sungai di DTA | Tersedianya data acuan pengendalian pencemaran Air | Penghitungan daya tampung beban pencemaran Air | Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas | Kementerian LHK, Kementerian Dikbudristek, |

di Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------------------------|---------|----------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | di Daerah Tangkapan Air | | kegiatan di Daerah Tangkapan Air | dan penentuan baku mutu Air limbah kegiatan di Daerah Tangkapan Air | dari sumbernya di Daerah Tangkapan Air | sungai di DTA dan penentuan baku mutu Air limbah kegiatan di Daerah Tangkapan Air | | BRIN, LIPI, Kesatuan Pengelolaan Hutan |
| | | | | Pembangunan sistem pengelolaan Air limbah domestik di sub-sub Daerah Aliran Sungai di Daerah Tangkapan Air | Menurunnya beban pencemaran Air ke sungai/Danau di Daerah Tangkapan Air | Terbangunnya sistem pengelolaan Air limbah domestik di sub-sub Daerah Aliran Sungai di Daerah Tangkapan Air | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas |
| | | | | Penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan | Menurunnya beban pencemaran Air ke sungai/Danau | Tersusunnya dan terimplementasi Perda tentang Pengelolaan Limbah Domestik | Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, LIPI, Universitas, Kepolisian RI |

Limbah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Limbah Domestik dan Non-Domestik | di Daerah Aliran Sungai | dan Non-Domestik | | |
| | | | | Penyusunan dan implementasi Perda tentang Izin Pengaturan dan Pelarangan Pertambangan Batuan | Menurunnya beban pencemaran Air ke sungai/Danau di Daerah Aliran Sungai | Penyusunan dan implementasi Perda tentang Izin Pembuangan Limbah | Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, LIPI, Universitas, Kepolisian RI |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 12. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaharui | 4.1. | Pengembangan sistem informasi Danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau, antara lain: batimetri, neraca Air, keanekaragaman hayati, kondisi sempadan, | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Pemda Prov. Sumatera Utara, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |

Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | Daerah Tangkapan Air dan sosial ekonomi | Pusat Statistik (BPS) | |
| | | | Pengembangan sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Terwujudnya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Tersedianya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Kementerian Dikbudristek, BRIN, Kementerian PPN/Bappenas, LIPI, Pemda Sumatera Utara, BIG, BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |
| | | | Pengembangan sarana dan prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan | Tersedianya data perkiraan dan peringatan bencana perairan Danau | Tersedianya sarana dan prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Pemda Prov. Sumatera | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas, Badan |

Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Danau (arus balik/ <i>overtum</i> , banjir) | | Danau (arus balik/ <i>overtum</i> , banjir) | Utara, BIG, BPS | Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) | |
| 13. | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Danau | 4.2. | Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Danau | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif dan efisien | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi | Pemda Prov. Sumatera Utara | Pemerintah kecamatan |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 14. | Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan Danau | 5.1. | Peningkatan peran pemangku kepentingan | Pelaksanaan kajian sosial ekonomi masyarakat (potensi dan dampak) dan kajian kearifan lokal dalam | Tersedianya bahan peningkatan peran masyarakat | Terlaksananya kajian sosial ekonomi masyarakat dan kajian kearifan lokal dalam | Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas | Kementerian LHK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), LIPI, |

penyelamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | penyelamatan Ekosistem Danau | | penyelamatan Ekosistem Danau | | Kementerian Dikbudristek, BRIN, Universitas |
| | | | Pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelompok masyarakat dalam penyelamatan Danau (pertanian ramah lingkungan, pengolahan sampah, ekowisata berbasis masyarakat dan budaya sadar wisata ramah sosial dan lingkungan) | Meningkatnya peran masyarakat | Terlaksananya pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelompok masyarakat | Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara, Universitas, Kementan, Kementerian Parekraf/ Baparekraf |

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pengembangan dan pembinaan Kelompok Tani Hutan | Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan Danau | Terlaksananya pengembangan dan pembinaan Kelompok Tani Hutan | Pemda Prov. Sumatera Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan | Pemda Prov. Sumatera Utara, Kementerian Perdagangan (Kemendag) |
| | | | Pelaksanaan kegiatan lingkungan dari kegiatan usaha dan satuan pendidikan | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksananya kegiatan lingkungan dari kegiatan usaha dan satuan pendidikan | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian Dikbudristek, BRIN |
| | | | Pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif masyarakat | Meningkatnya peran para pihak dan terciptanya usaha masyarakat | Terlaksananya pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif masyarakat | Pemda Prov. Sumatera Utara, Badan Otorita Pengelola Kawasan | Kementerian Parekraf/ Baparekraf |

Pariwisata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | Pariwisata Danau Toba | |
| | | | Pengembangan desa wisata, penyediaan sarana dan prasarana pariwisata dan promosi pariwisata Danau | Meningkatnya peran para pihak dan terciptanya usaha masyarakat | Pengembangan 7 Desa Wisata, penyediaan sarana prasarana pariwisata di 10 obyek wisata dan 20 kegiatan promosi pariwisata Danau | Pemda Prov. Sumatera Utara, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba | Kementerian Parekraf/ Baparekraf, Kementerian PUPR, Pelaku Usaha |
| 15. | Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan Danau | 5.2. Pengembangan kelembagaan pengelolaan Danau | Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia | Meningkatnya sinergi pengelolaan Danau oleh para pihak | Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia | Kemendagri, Pemda Prov. Sumatera Utara | Kementerian LHK, Kementerian PUPR |

2. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

2. DANAU SINGKARAK

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | 1.1. Penataan Ruang | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau | Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |
| | | | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau di tingkat Kabupaten | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Tersusunnya Perda Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Danau | Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |

Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|--|---|--|--|----------------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Sumatera Barat |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Prov. Sumatera Barat | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, |

Pemda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--------------------------------------|---------|--|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | | Pemda Prov. Sumatera Barat | |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. | Pengendalian pencemaran Air dari lahan pertanian | Pengembangan percontohan pertanian organik | Terciptanya pertanian ramah lingkungan | Terbangunnya 10 hektar percontohan pertanian organik | Kementan, Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |
| | | 3.2. | Pengendalian eceng gondok | Pengembangan percontohan pengelolaan eceng gondok | Berkurangnya sebaran eceng gondok | Terbangunnya 4 percontohan pengolahan eceng gondok | Pemda Prov. Sumatera Barat | Kementerian LHK, Kementerian PUPR |
| | | | | Pembersihan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Dilaksanakannya pembersihan eceng gondok | Kementerian PUPR | Pelaku Usaha |

3.3. Pengendalian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---|---|---|---|----------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 3.3. Pengendalian pencemaran Air dari perikanan budi daya dengan keramba jaring apung | Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penataan Perikanan Budi Daya dengan keramba jaring apung | Tertatanya perikanan budi daya dengan keramba jaring apung sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Tersusun dan ditetapkan Pergub tentang Penataan Perikanan Budi Daya dengan keramba jaring apung | Pemda Prov. Sumatera Barat | LIPI, Pemda Sumatera Barat |
| | | | Pengembangan kolam ikan di Sempadan Danau | Terwujudnya kolam ikan ramah lingkungan di daratan | Terbangunnya 20 kolam ikan ramah lingkungan di Sempadan Danau | Pemda Prov. Sumatera Barat | LIPI, Pemda Sumatera Barat, Universitas |
| | | | Pengembangan percontohan perikanan budi | Terbangunnya percontohan perikanan budi | Terbangunnya 5 paket perikanan darat | Pemda Prov. Sumatera Barat | LIPI, Pemda Sumatera |

daya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | daya ramah lingkungan | daya ramah lingkungan | | | Barat, Universitas |
| | | 3.4. Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sumatera Barat | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Barat, Kementerian ESDM, Pelaku Usaha |
| 4. | Banyaknya sampah di Danau dan sekitar Danau | 3.5. Pengelolaan sampah | Pengelolaan sampah di Danau dan sekitarnya | Terbangunnya model pengelolaan sampah | Terbangunnya 5 unit bank sampah dilengkapi sarana dan prasarana | Pemda Prov. Sumatera Barat | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sumatera Barat |

5. Menurunnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|--|---|--|---|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| 5. | Menurunnya keanekaragaman hayati | 3.6. Pelestarian keanekaragaman hayati | Revisi Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat Tangkap | Tersusunnya pergub yang mengatur pelarangan penggunaan jaring insang dengan mata jaring kurang dari 1 inci | Tersusunnya revisi Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat Tangkap | Pemda Sumatera Barat | Prov. Sumatera Barat, Universitas |
| | | | Penyediaan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan | Tersedianya sarana penangkapan ikan ramah lingkungan | Tersedianya 8 perahu dan 150 buah alat penangkapan ikan ramah lingkungan | Pemda Sumatera Barat | Prov. Sumatera Barat, Universitas |
| | | | Pengembangan reservat di Danau, domestikasi, pembenihan dan penebaran kembali | Berkembangnya populasi ikan asli Danau | Tersedia dan terjaganya habitat alami ikan, serta tersedianya benih | Pemda Sumatera Barat | Prov. Sumatera Barat, Universitas |

(restocking) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | (restocking) ikan asli Danau | | ikan lokal untuk penebaran kembali (restocking) dan budi daya | | Barat, Universitas |
| 6. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/merusak Danau | 3.7. Penataan kawasan Sempadan Danau | Penentuan dan penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Barat |
| | | | Penertiban bangunan tak berizin | Pemulihan fungsi Sempadan Danau | Kawasan Sempadan Danau bebas dari bangunan tak berizin | Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |

Penerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|-----------------------------------|---|---|--|---|----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Penerapan ketentuan izin lingkungan dan peraturan teknis lainnya | Terkendalinya pemanfaatan Sempadan Danau | Terpenuhinya kewajiban memiliki izin lingkungan dan peraturan teknis lainnya bagi seluruh usaha dan kegiatan di Sempadan Danau | Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |
| 7. | Lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen | 3.8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Penyusunan Pergub tentang Penanganan Lahan Kritis Bekas Pertambangan Batuan | Berkurangnya lahan kritis dan longsor | Tersusunnya Pergub tentang Penanganan Lahan Kritis Bekas Pertambangan Batuan | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |
| | | | Reboisasi hutan rakyat dan | Berkurangnya lahan kritis dan mempertahankan luas hutan | Tertanamnya 10.000 batang pohon reboisasi | Kementerian LHK | Pemda Prov. Sumatera Barat |

penghijauan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | penghijauan lingkungan | di Daerah Tangkapan Air Danau | | | |
| | | | Rehabilitasi lahan Sempadan Danau | Tidak terjadinya longsor di Sempadan Danau | Tertanamnya 2.500 pohon di Sempadan Danau | Kementerian LHK | Pemda Prov. Sumatera Barat |
| | | | Pembuatan bangunan konservasi tanah dan Air | Berkurangnya sedimentasi badan Air | Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan Air | Kementerian LHK | Pemda Prov. Sumatera Barat |
| | | | Rehabilitasi telaga | Meningkatnya fungsi telaga sebagai sumber Air | Terehabilitasi-nya 16 telaga | Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |

Strategi 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | |
| 8. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaru | 4.1. Pengembangan sistem informasi Danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau, antara lain: batimetri, neraca Air, keanekaragaman hayati, kondisi sempadan, Daerah Tangkapan Air dan sosial ekonomi | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Pemda Prov. Sumatera Barat, BIG, dan BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |
| | | | Pengembangan sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Terwujudnya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan | Tersedianya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan | Kementerian Dikbudristek, BRIN, Kementerian PPN /Bappenas, LIPI, Pemda Prov. Sumatera | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |

Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Danau berkelanjutan | Danau berkelanjutan | Barat, BIG, BPS | |
| | | | Pengembangan sarana dan prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan Danau (arus balik/ <i>overturn</i> , banjir) | Tersedianya data perkiraan dan peringatan bencana perairan Danau | Tersedianya sarana dan prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan Danau (arus balik/ <i>overturn</i> , banjir) | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Pemda Prov. Sumatera Barat, BIG, BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas, BNPB |
| | | | Studi keanekaragaman hayati dan penangkapan ikan ramah lingkungan | Tersedianya acuan pelestarian keanekaragaman hayati dan pola | Terlaksananya studi | Kementerian LHK dan Kementerian KP | Pemda Prov. Sumatera Barat, Universitas |

penangkapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---|--|--|--|----------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | penangkapan ikan yang tepat | | | |
| 9. | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Danau | 4.2. Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Danau | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif dan efisien | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi | Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | |
| 10. | Belum optimalnya peran pemangku kepentingan dalam penyelamatan Danau | 5.1. Pengembangan imbal jasa lingkungan | Kajian dan pengembangan pola imbal jasa lingkungan | Meningkatnya peran para pihak dalam penyelamatan Danau khususnya dari para pemanfaat jasa lingkungan Danau | Dilaksanakannya kajian dan perumusan pola imbal jasa lingkungan yang tepat | Kementerian LHK | Kementerian ESDM, Kementerian Parekraf/ Baparekraf, Kemenperin, Universitas |

5.2. Pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | 5.2 | Pemberdayaan dalam pengelolaan sampah | Peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah | Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola sampah | Terbentuknya 13 kelompok masyarakat | Pemda Prov. Sumatera Barat | Pemda Prov. Sumatera Barat |
| | | | | Penyuluhan masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Kementerian LHK | Pemda Prov. Sumatera Barat |

3. Danau ...

821021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

3. DANAU MANINJAU

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|----------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan rencana zonasi/Rencana Rinci Tata Ruang kawasan Danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Tersusun, ditetapkan, dan diimplementasikannya Perda zonasi | Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemda Kab.) Agam | Kementerian ATR/BPN, Pemda Kab. Agam |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkannya zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, Pemda Kab. Agam |

Strategi 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | | |
|--|--|---------|--|---|--|--|-----------------------|------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Agam | Kab. | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, Pemda Kab. Agam |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. | Pengelolaan kualitas Air | Penyediaan/ pembangunan sarana dan prasarana atau teknologi | Terpulihkannya kualitas Air Danau | Tersedianya sarana prasarana untuk | Kementerian LHK, LIPI | | Kementerian Parekraf/ Baparekraf, |

pemulihan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---|---|---|--|------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | pemulihan kualitas Air Danau | | | LIPI, Pemda Kab. Agam |
| | | 3.2. Pengendalian Pencemaran Air dari perikanan budi daya dengan keramba jaring apung | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Desain Keramba Jaring Apung | Berkurangnya jumlah keramba jaring apung hingga sesuai daya dukung dan daya tampung Danau | Tersusun, ditetapkan, tersosialisasi dan diimplementasikannya Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Desain Keramba Jaring Apung | Pemda Agam Kab. | Kementerian KP, LIPI, Pemda Kab. Agam, Universitas |
| | | | Pengurangan jumlah keramba jaring apung | Tertatanya budi daya ikan dengan keramba jaring apung sesuai daya dukung dan | Menurunnya jumlah petak Keramba Jaring Apung dari 17.635 petak keramba jaring | Pemda Agam Kab. | Kementerian KP, LIPI, Pelaku Usaha, Universitas |

daya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | daya tampung Danau | apung menjadi 6.000 petak keramba jaring apung | | |
| | | | Pengurangan jumlah pakan ikan | Berkurangnya sisa/lebih pakan yang mengakibatkan pencemaran Danau | Menurunnya penggunaan pakan ikan dari 800 ton menjadi 200 ton per bulan | Pemda Kab. Agam | Kementerian KP, LIPI, Pemda Kab. Agam, Pelaku Usaha, Universitas |
| | | | Pemanfaatan teknologi pemberian pakan ikan | Berkurangnya pencemaran Danau | Tersedianya teknologi pemberian pakan ikan | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo), Pemda Kab. Agam | Kementerian KP, LIPI, Pemda Kab. Agam, Universitas |
| | | | Pengembangan pola budi daya | Berkurangnya pencemaran Danau melalui | Terbangunnya 8 unit budi daya | LIPI, Pemda Kab. Agam | Kementerian KP, LIPI, Pemda |

multitrofik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | multitrofik dan rekayasa habitat | budi daya multitrofik dan rekayasa habitat | multitrofik dan rekayasa habitat | | Kab. Agam, Universitas |
| 4. | Sebaran sampah dan gulma di Danau | 3.3. | Pengendalian sampah dan gulma Air di Danau | Pengendalian gulma Air dan pembersihan sampah | Terkendalinya pertumbuhan gulma Air dan teratasinya sampah di Danau | Berkurangnya tutupan Danau | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Agam | Pemda Kab. Agam |
| | | | | Pengadaan alat pembersih, pengolah sampah dan gulma Air | Berkurangnya sampah dan gulma Air di Danau | Tersedianya alat pembersih, pengolah sampah dan gulma Air | Kementerian LHK, Kementerian PUPR | Pemda Kab. Agam |
| 5. | Pencemaran Air Danau dari kegiatan di sekitar Danau | 3.4. | Pengendalian Pencemaran Air dari kegiatan di sekitar Danau | Penertiban izin usaha di sekitar Danau | Meningkatnya kepatuhan usaha di sekitar Danau dalam pengendalian pencemaran | Kegiatan usaha di sekitar Danau mematuhi perizinan | Pemda Kab. Agam | Pemda Kab. Agam |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR | Pemda Kab. Agam |
| 6. | Adanya sedimentasi di dalam Danau | 3.5. | Pengendalian sedimen | Penyedotan sedimen | Sedimen di Danau berkurang | Sisa pakan ikan dapat disedot dan dikelola pada <i>disposal area</i> | Kementerian PUPR | Pemda Kab. Agam |
| 7. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.6. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Pengembangan reservat di Danau, domestikasi, pembenihan dan penebaran kembali (<i>restocking</i>) ikan asli Danau | Berkembangnya populasi ikan asli Danau | Tersedia dan terjaganya habitat alami ikan, serta tersedianya benih ikan lokal untuk penebaran kembali (<i>restocking</i>) dan budi daya | Pemda Kab. Agam, LIPI | Kementerian KP, LIPI, Universitas |

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Penyediaan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan | Tersedianya sarana penangkapan ikan ramah lingkungan | Tersedianya 25 unit alat penangkapan ikan ramah lingkungan | Pemda Kab. Agam, LIPI | Kementerian KP, LIPI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) |
| | | | Revitalisasi hulu Daerah Aliran Sungai dengan membongkar kolam ikan masyarakat | Normalisasi hulu Daerah Aliran Sungai, Pengembalian kapasitas, dan fungsi hulu Daerah Aliran Sungai | Peniadaan kolam ikan masyarakat di hulu Daerah Aliran Sungai | Kementerian PUPR, Kementerian LHK | Pemda Kab. Agam |
| 8. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak | 3.7. Penataan kawasan Sempadan Danau | Penentuan dan penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Agam | Pemda Kab. Agam, Kementerian ATR/BPN |

Mencemari/ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----------|---|---------|------------------------------|---|--|--|----------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | mencemari/ merusak Danau | | | | fungsinya sebagai kawasan lindung | | | | |
| | | | | Penyusunan rencana pemanfaatan Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai peruntukan | Tersusunnya rencana pemanfaatan Sempadan Danau | Pemda Agam | Kab. Agam | |
| | | | | Pembersihan bangunan di Sempadan Danau | Tertatanya bangunan di Sempadan Danau | Bangunan di sempadan efektif dan sesuai peruntukan | Pemda Agam | Kab. Agam | |
| 9. | Lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen | 3.8. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | RHL secara vegetatif | Penurunan lahan kritis di Daerah Tangkapan Air Danau | Terehabilitasinya 1073 hektar lahan sangat kritis, 1308 hektar lahan kritis dan 3020 | Kementerian LHK, Pemda Kab. Agam | Pemda Agam | Kab. Agam |

hektar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | hektar lahan agak kritis | | | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 10. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaharui | 4.1. | Pengembangan sistem informasi Danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau, antara lain: batimetri, neraca Air, keanekaragaman hayati, kondisi sempadan, DTA Danau dan sosial ekonomi | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Pemda Kab. Agam, BIG dan BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |
| | | | | Pengembangan sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan | Terwujudnya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan | Tersedianya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan | Kementerian Dikbudristek, BRIN, Kementerian PPN/ Bappenas, | Kementerian PUPR, Kementerian |

Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Danau berkelanjutan | Danau berkelanjutan | Danau berkelanjutan | LIPI, Pemda Kab. Agam, BIG, BPS | LHK, Universitas |
| | | | Pengembangan sarana dan prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan Danau (arus balik/ <i>overturn</i> , banjir) | Tersedianya data perkiraan dan peringatan bencana perairan Danau | Tersedianya sarana prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan Danau (arus balik/ <i>overturn</i> banjir) | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Pemda Kab. Agam, BIG, BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BNPB, Universitas |
| | | | Studi keanekaragaman hayati dan penangkapan ikan ramah lingkungan | Tersedianya acuan pelestarian keanekaragaman hayati dan pola penangkapan ikan yang tepat | Terlaksananya studi | Kementerian LHK, Kementerian KP | Pemda Kab. Agam, Universitas |

11. Belum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | | |
|-----|---|---------|--|--|---|---|------------------|------|--|------|
| | | | | | | | Utama | | Pendukung | |
| 11. | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Danau | 4.2. | Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Danau | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif dan efisien | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi | Pemda Agam | Kab. | Pemda Agam | Kab. |
| 12. | Diperlukannya peningkatan monitoring dan evaluasi serta pengembangan data dan informasi | 4.3. | Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Danau | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif dan efisien | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi | Pemda Agam | Kab. | Pemda Agam | Kab. |
| | | 4.4. | Pengembangan basis data dan sistem informasi | Pengembangan basis data | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif, efisien | Tersedianya peta biofisik dan sosial ekonomi lingkungan Danau | Pemda Agam | Kab. | Kementerian LHK, LIPI, Pemda Agam, Universitas | Kab. |

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-48-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | dan terpublikasi dengan baik | | | |
| | | | | Pembangunan sistem informasi | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif, efisien dan terpublikasi dengan baik | Terbangunnya sistem informasi berbasis teknologi | Pemda Agam Kab. | Pemda Agam, LIPI, Universitas |
| | | | | Penyusunan status mutu Air Danau | Kualitas Air Danau sesuai peruntukan dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Tersusunnya status mutu Air Danau | Kementerian LHK, LIPI | Pemda Agam Kab. |

Studi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Studi revitalisasi Danau (analisis tipe sedimen) | Sedimentasi Danau dapat dikendalikan | Tersedia data jenis sedimen | Kementerian PUPR | LIPI, Pemda Kab Agam, Nagari, Universitas |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 13. | Diperlukannya peran dan keterlibatan para pihak | 5.1 | Imbal jasa lingkungan | Pengembangan pola dan penerapan imbal jasa lingkungan | Penyelamatan Danau didukung oleh seluruh pihak khususnya pemanfaatan jasa lingkungan Danau | Tersedianya pola dan diterapkannya imbal jasa lingkungan | Pemda Kab. Agam | Kementerian LHK |
| | | 5.2 | Peningkatan peran serta masyarakat | Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat | Masyarakat mandiri dan berperan aktif | Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan bagi kelompok masyarakat di sekitar Danau | Pemda Kab. Agam, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Universitas | Pemda Kab. Agam |

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-50-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|---------------------------------------|--|------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Danau (antara lain melalui alih usaha masyarakat menjadi perikanan darat, mina padi, peternakan, pembuatan kerajinan, kuliner, ekowisata, pengolahan limbah/sedimen dan lain-lain secara ramah lingkungan) | Masyarakat mandiri dan berperan aktif | Tersedianya sarana dan prasarana dan demplot serta terlaksananya pendampingan bagi kelompok masyarakat | Pemda Agam | Kab. Kementerian LHK, Pemda Kab. Agam, Universitas |

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|--|------------------|-----------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam RHL | Dilaksanakannya penyuluhan dan dilibatkannya masyarakat dalam RHL 9 nagari, 7.000 siswa, dan 120 pengantin | Kementerian LHK | Pemda Kab. Agam |

4. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

4. DANAU KERINCI

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|----------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Terwujudnya Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Tersusun, ditetapkan, dan diimplementasi-kannya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Jambi | Pemda Prov. Jambi |
| | | | | Penyusunan zonasi badan air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkannya zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Jambi |

2. Perlu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-53-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | | |
|--|--|---|--|---|--|------------------|-------------|---|-------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | | |
| 2. | Perlu dikembangkan-nya tata kelola Danau | 1.2. Pengembangan Tata Kelola Danau | Penyusunan, sosialisasi, dan implementasi tentang pengelolaan Danau | Terwujudnya pengelolaan Danau berkelanjutan, termasuk mengkaji peraturan terkait | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasikannya Pengelolaan Danau lintas sektor dan lintas kabupaten | Pemda Jambi | Prov. Jambi | Pemda Jambi | Prov. Jambi |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | | |
| 3. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan | 2.1. Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan | Pemda Jambi | Prov. | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ | |

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|-------------------------------|---------|---|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | dan dokumen perencanaan | | | | dan dokumen perencanaan | Danau Prioritas Nasional | | Bappenas, Pemda Prov. Jambi |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 4. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1 | Pengelolaan kualitas Air Danau | Penetapan baku mutu dan status trofik Air Danau | Tersedianya data dan informasi baku mutu dan status trofik Air sebagai acuan pemanfaatan Danau sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan | Ditetapkan dan diimplementasikannya baku mutu dan status trofik Air sebagai acuan pengelolaan Danau | Pemda Prov. Jambi, Perum Jasa Tirta | Kementerian LHK, LIPI, Universitas |
| | | 3.2 | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Jambi | Kementerian LHK, Pemda Prov. Jambi |

sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | sumber di sekitar Danau | limbah domestik dan persampahan | dan persampahan | | | |
| | | 3.3. | Pengendalian eceng gondok | Pembersihan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Dilaksanakannya pembersihan eceng gondok | Kementerian PUPR | Pelaku usaha |
| 5. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.4. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Pengembangan reservat di Danau, domestikasi, pembenihan dan penebaran kembali (<i>restocking</i>) ikan asli Danau | Berkembangnya populasi ikan asli Danau | Tersedia dan terjaganya habitat alami ikan, serta tersedianya benih ikan lokal untuk penebaran kembali (<i>restocking</i>) dan budi daya | Pemda Jambi Prov. | Kementerian KP, Pemda Prov. Jambi, LIPI, Universitas |
| | | | | Penyuluhan dan pendampingan | Terwujudnya pelestarian ikan | Dilaksanakannya penyuluhan | Pemda Jambi Prov. | Kementerian KP, Pemda |

penangkapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|---------------------------------|--|--|---|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | penangkapan ikan ramah lingkungan, serta penertiban perikanan tangkap yang tidak ramah lingkungan di Danau | spesies endemik perairan Danau | dan pendampingan penangkapan ikan ramah lingkungan, serta penertiban penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan | | Prov. Jambi, LIPI, Universitas |
| 6. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/ merusak danau | 3.5. | Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jambi |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|---|--|---|--|------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Pembangunan <i>greenbelt</i> dengan penanaman vegetasi di sekeliling Danau dengan tanaman yang sesuai | Mencegah erosi ke Danau, meningkatkan resapan Air, serta agar pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya | Terlaksananya pembangunan <i>greenbelt</i> dengan tanaman yang sesuai | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jambi, Kepolisian RI | |
| 7. | Banyaknya sampah di sekitar Danau | 3.6. | Pengelolaan sampah | Pembangunan unit pengolahan sampah | Terkelolanya sampah di sekitar Danau | Terbangunnya unit pengolahan sampah di 15 desa | Pemda Prov. Jambi | Kementerian LHK |
| | | | Pengembangan sistem manajemen/tata kelola | Terkelolanya sampah di sekitar Danau | Dikembangkan-nya sistem manajemen/tata | Pemda Prov. Jambi | Kementerian LHK, Pemda Prov. Jambi | |

persampahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|--|--|---|--|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | persampahan di sekitar Danau | kelola persampahan | | | |
| 8. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 3.7. | Rehabilitasi hutan dan lahan di Daerah Tangkapan Air danau | Penanaman dengan Tanaman Multi Guna | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan | Terlaksananya penanaman lahan kritis di Daerah Tangkapan Air Danau | Kementerian LHK, Pemda Prov. Jambi | Pemda Prov. Jambi |
| | | | | Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sipil teknis dengan pembuatan bangunan pengendali erosi/sedimen | Berkurangnya erosi/sedimentasi | Terlaksananya pembuatan bangunan pengendali erosi/sedimen | Kementerian LHK, Pemda Prov. Jambi | Pemda Prov. Jambi |

9. Pencemaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | | |
|-----|---|--|--|---|---|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | | |
| 9. | Pencemaran dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertanian yang tidak ramah lingkungan | 3.8. Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Pengembangan Desa Organik melalui pertanian yang menggunakan pupuk organik | Berkurangnya buangan limbah pupuk kimia ke perairan Danau | Terlaksananya pertanian organik di 15 desa | Pemda Jambi | Prov. Jambi | Pemda Jambi | Prov. Jambi |
| | | | Penerapan pertanian dengan prinsip konservasi tanah dan Air | Berkurangnya erosi dari lahan pertanian | Terwujudnya kegiatan pertanian di sekitar Danau yang menerapkan prinsip konservasi tanah dan Air di 15 desa | Pemda Jambi | Prov. Jambi | Pemda Jambi, | Prov. Universitas |
| 10. | Belum dikembangkan-potensi Pembangkit | 3.9. Pengembangan potensi PLTA/mikrohidro | Pembangunan PLTA/mikrohidro ramah lingkungan di danau | Terwujudnya PLTA/mikrohidro ramah lingkungan | Dilaksanakannya pembangunan PLTA/mikrohidro | Pemda Jambi | Prov. Jambi | Pemda Jambi | Prov. Jambi |

Listrik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | Listrik Tenaga Air (PLTA)/mikrohidro | | ramah lingkungan | | | | | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 11. | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Danau | 4.1. | Pemantauan dan Evaluasi | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan Danau | Tersedianya data dan informasi kondisi danau, antara lain: batimetri, neraca Air, keanekaragaman hayati, kondisi Sempadan Danau, DTA Danau dan sosial ekonomi | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BIG dan BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |
| 12. | Belum dikembangkan potensinya | 4.2. | Pengembangan potensi PLTA PLTA/mikrohidro | Pelaksanaan kajian potensi Air danau untuk | Tersusunnya kajian potensi Air danau sebagai acuan pengem- | Dilaksanakannya kajian pemanfaatan Air Danau untuk | Pemda Prov. Jambi | Pemda Prov. Jambi |

PLTA/ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | PLTA/mikrohidro | | ramah lingkungan | PLTA/mikrohidro ramah lingkungan | bangan potensi PLTA/mikrohidro ramah lingkungan | PLTA/mikrohidro ramah lingkungan | | |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 13. | Belum optimalnya peran Pemangku Kepentingan dalam penyelamatan Danau | 5.1. | Pengembangan kelembagaan pengelolaan Danau | Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia | Meningkatnya sinergi pengelolaan Danau oleh para pihak | Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM | Kemendagri, Pemda Prov. Jambi | Kementerian LHK, Kementerian PUPR |
| | | | | Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat | Terwujudnya Masyarakat di sekitar Danau yang mandiri dan berperan aktif dalam | Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan bagi kelompok masyarakat di sekitar Danau | Pemda Prov. Jambi | Pemda Prov. Jambi, Universitas, Pelaku Usaha |

pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-62-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|---|------------------|--------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | pengelolaan Danau | | | |
| | | | Pembentukan dan penggiatan Forum Pemuda dalam pengelolaan Danau | Meningkatnya peran Pemuda dalam pengelolaan Danau | Terlaksananya pembentukan dan penggiatan Forum Pemuda dalam pengelolaan Danau | Pemda Jambi | Prov. Jambi, Universitas |
| | | | Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran masyarakat adat | Meningkatnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan Danau | Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran masyarakat adat | Pemda Jambi | Prov. Jambi, Universitas |

5. Danau. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-63-

5. DANAU RAWA DANAU

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|----------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Belum ditetapkan DAS Cidanau sebagai Kawasan Strategis Provinsi Banten | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan dan implementasi DAS Cidanau sebagai Kawasan Strategis Provinsi Banten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. | Terkendalinya pemanfaatan ruang di kawasan Danau | Tersedianya dan diimplementasikannya RTRW DAS Cidanau sebagai Kawasan Strategis Prov. Banten | Pemda Prov. Banten, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, | Pemda Prov. Banten |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, |

Pemda. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|---|---------|--|--|---|--|--------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | | Pemda Prov. Banten | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Belum terintegrasinya program dan kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Prov. Banten | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, Pemda Prov. Banten |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas air dan eutrofikasi | 3.1. | Pengelolaan kualitas air | Penyusunan surat keputusan gubernur tentang | Terkelolanya kualitas air | Ditetapkannya dan diimplementasi- | Pemda Prov. Banten | Kementerian LHK |

baku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-65-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|--|--|---|--|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | baku mutu dan status trofik | | kannya surat keputusan gubernur tentang baku mutu air dan status trofik | | |
| | | 3.2. | Pengendalian pencemaran Air dari pertanian | Pengembangan pertanian yang menerapkan penanganan residu pupuk dan pestisida | Menurunnya pencemaran Air dari kegiatan pertanian ke sungai/danau di Daerah Tangkapan Air Danau | Terlaksananya pengembangan pertanian yang menerapkan penanganan residu pupuk dan pestisida di 10 desa (2 desa per tahun) | Kementan, Pemda Prov. Banten | Pemda Prov. Banten |
| | | 3.3. | Pengelolaan gulma | Pembabatan gulma | Mengembalikan kembali kondisi rawa (<i>reswamping</i>) | Berkurangnya tutupan Danau dari gulma dan pengembalian kondisi rawa di | Pemda Prov. Banten | Pemda Prov. Banten |

Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|---|---------|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | Danau seluas 500 ha | | | |
| | | 3.4. | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Banten | Kementerian LHK, Pemda Prov. Banten, Kementerian ESDM, Pelaku usaha |
| 4. | Kerusakan dan Perambahan Kawasan (Cagar Alam Rawa Danau) | 3.5. | Peningkatan pengelolaan dan pengamanan kawasan (Cagar Alam Rawa Danau) | Penyusunan peraturan tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu dan jasa lingkungan di Cidanau | Terkelolanya Cagar Alam Rawa Danau yang berkelanjutan | Tersusunnya peraturan tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu dan jasa lingkungan di Cidanau | Pemda Prov. Banten | Kementerian LHK, Pemda Prov. Banten |
| | | | Operasi pengamanan represif | Berkurangnya tekanan terhadap kelestarian Cagar | Terlaksananya paling sedikit 5 paket operasi | Kementerian LHK | Pemda Prov. Banten | |

mandiri/ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|--|---|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | mandiri/fungsional dan patroli pengamanan dengan melibatkan masyarakat | Alam Rawa Danau | pengamanan (1 paket per tahun), 50 kali patroli pengamanan (10 kali dalam setahun), 40 km pemeliharaan pal batas (8 km per tahun), dan 5 paket kegiatan Mitra Polhut (1 paket per tahun) | | | |
| | | 3.6. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Pengembangan budi daya tanaman bawah tegakan, agroforestri dan pembuatan bangunan sipil teknis pengendali | Berkurangnya lahan kritis dan menurunnya laju erosi/sedimentasi | Terlaksananya budi daya tanaman bawah tegakan seluas 30 ha, agroforestri seluas 200 ha, dan pembuatan bangunan sipil | Kementerian LHK, Pemda Prov. Banten | Pemda Prov. Banten, Pelaku Usaha |

erosi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-68-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | erosi serta penahan dan <i>gully plug</i> . | | | |
| 5. | Rendahnya tingkat pengelolaan sampah | 3.7. Pengelolaan sampah | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | Terkelolanya sampah di Danau dan sekitarnya. | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di 60 desa (12 desa pertahun) di Daerah Tangkapan Air Danau | Pemda Prov. Banten | Kementerian LHK, Kemenperin |
| 6. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/ merusak Danau | 3.8. Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau dengan memperhatikan batas dan fungsinya | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Banten | Kementerian LHK, Pemda Prov. Banten |

sebagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | sebagai kawasan lindung | | | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 7. | Belum terbaharuinya data dan informasi Cagar Alam Rawa Danau | 4.1. | Pengembangan sistem informasi | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi bagi pengelolaan Cagar Alam Rawa Danau | Tersedianya data dan informasi kondisi danau, antara lain: batimetri, neraca air, keanekaragaman hayati, kondisi sempadan, DTA dan sosial ekonomi | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, BPPT, BIG, BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |
| | | | | Perbaharuan data dan pengembangan <i>e-library</i> Cagar Alam Rawa Danau | Tersedianya data dan informasi Cagar Alam Rawa Danau yang dapat diakses secara luas. | Terlaksananya perbaharuan data dan pengembangan <i>e-library</i> Cagar Alam Rawa Danau | Kementerian LHK, Kementerian Kominfo, | Pemda Prov. Banten |

Pemda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|--|---|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | Pemda Prov. Banten, LIPI | | |
| | | | Pembuatan dan pemeliharaan papan informasi tentang Cagar Alam Rawa Danau | Tersedianya media komunikasi mengenai Cagar Alam Rawa Danau yang efektif dan estetika | Tersedianya papan informasi (10 papan per tahun) | Pemda Prov. Banten | Pemda Prov. Banten | |
| | | 4.2. | Pengembangan Data | Penelitian hidrologi Daerah Aliran Sungai Cidanau | Tersedianya acuan pengendalian erosi berdasarkan hidrologi Daerah Aliran Sungai | Terlaksananya penelitian hidrologi | Pemda Prov. Banten | Kementerian LHK |
| | | | | Pengumpulan bahan keterangan | Terwujudnya lingkungan yang | Terwujudnya bahan keterangan | Kementerian LHK, | Pemda Prov. Banten |

pelanggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-71-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|---|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | pelanggaran hukum | aman dan nyaman di Cagar Alam Rawa Danau | berupa data dan fakta pelanggaran hukum | Kejaksanaan, Kepolisian RI, dan Pemda Prov. Banten | | |
| | | | Mobilisasi dana jasa lingkungan dan identifikasi lokasi KTH potensial | Terehabilitasinya Daerah Tangkapan Air Danau atau Kawasan Cagar Alam Rawa Danau | Teridentifikasinya lokasi KTH seluas 250 ha | Kementerian LHK | Pemda Prov. Banten | |
| | | 4.3. | Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan dan evaluasi kualitas Air di 8 sungai di Sub DAS Cidanau dan Cagar Alam Rawa Danau | Tersedianya data dan informasi kualitas Air di 8 sungai di Sub DAS Cidanau dan Cagar Alam Rawa Danau | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kualitas Air di 60 desa | Kementerian LHK, Pemda Prov. Banten | Pemda Prov. Banten |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-72-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|---|---------|--|--|---|--|--------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 8. | Belum optimalnya pengembangan sosial ekonomi di kawasan Danau | 5.1. | Pengembangan Sosial Ekonomi | Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat, kader konservasi dan anak sekolah dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Cagar Alam Rawa Danau | Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Cagar Alam Rawa Danau | Terbinanya 3 kelompok masyarakat, 5 kelompok studi banding, 5 angkatan (30 orang) kader konservasi, 5 kegiatan penyuluhan di sekolah (50 orang per kegiatan) | Pemda Banten | Prov. Banten Kementerian LHK, Pemda Prov. Banten, Kementerian Pertahanan, Kementerian Parekraf/ Baparekraf, Universitas |
| | | 5.2. | Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | Melakukan <i>review</i> perubahan surat keputusan gubernur tentang forum komunikasi danau | Meningkatnya peran para pihak | Terbitnya surat keputusan gubernur tentang forum komunikasi danau | Pemda Banten | Prov. Banten Pemda Prov. Banten |

Koordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Koordinasi dan fasilitasi forum | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksana 60 paket kegiatan forum | Kementerian LHK | Pemda Prov. Banten |

6. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74-

6. DANAU RAWA PENING

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Belum tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah | 1.1. | Penataan ruang kawasan Danau | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Kawasan Rawa Pening | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi-kannya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Kawasan Rawa Pening | Pemda Prov. Jawa Tengah, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air (eceng gondok, keramba jaring | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai | Tersusun dan ditetapkannya zonasi badan Air | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, |

apung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-75-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | apung, pariwisata, PLTA, air baku) dan Sempadan Danau | fungsi Ekosistem Danau | dan Sempadan Danau | | Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Jawa Tengah | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Prov. Jawa Tengah | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, Pemda Prov. Jawa Tengah |

2.2. Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-76-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--------------------------------------|---------|--|---|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | 2.2 | Penyusunan kebijakan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Penyusunan rancangan peraturan dan standar pedoman kriteria bidang penyehatan lingkungan permukiman | Pengelolaan kawasan sesuai dengan standar kesehatan lingkungan permukiman | Tersedianya peraturan dan standar pedoman kriteria bidang penyehatan lingkungan permukiman | Kementerian PUPR, Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah, Universitas |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1 | Pengendalian pencemaran Air dari perikanan budi daya | Pengurangan jumlah keramba dan beronjong | Berkurangnya pencemaran Air dari kegiatan perikanan budi daya, saat ini terdapat 152 unit keramba dan 186 unit beronjong | Berkurangnya jumlah keramba dan beronjong secara bertahap setiap tahun hingga tercapai 0 keramba dan 0 beronjong pada tahun kelima | Kementerian KP, Kementerian LHK | LIPI, Pemda Prov. Jawa Tengah, Universitas |

4. Tingginya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-77-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 4. | Tingginya sedimentasi Danau yang mengakibatkan Danau semakin sempit dan dangkal | 3.2. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen di Danau yang memperhatikan Ekosistem | Berkurangnya sedimen di Danau | Terlaksananya pengerukan sedimen di Danau | Kementerian PUPR, Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah, Universitas |
| | | | | Pengerukan dan pengembalian kapasitas dan fungsi sungai yang mengalir ke Danau | Agar sungai mampu menampung debit banjir | Terlaksananya pengembalian kapasitas dan fungsi Sungai Kedungringis, Tapen, Lapeo, Ngraco, Praguman, dan Ngaglik | Kementerian PUPR, Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah, Universitas |
| | | 3.3. | Operasi dan pemeliharaan | Penyediaan, operasi dan pemeliharaan | Pengembalian fungsi | Pengambilan sedimen secara rutin serta penggantian | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jawa Tengah |

sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-78-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|---|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | sarana dan prasarana | tampungan Air Danau | ralling dan pengecatan jembatan | | | |
| | | | Pengadaan alat operasi dan pemeliharaan | Pengembalian fungsi tampungan Air Danau | Terlaksananya pengadaan alat operasi dan pemeliharaan | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jawa Tengah | |
| 5. | Tutupan eceng gondok yang mencapai 70% di Danau | 3.4. | Pengendalian eceng gondok | Pembersihan eceng gondok | Terkendalinya eceng gondok di Danau | Terlaksananya pengurangan tutupan oleh eceng gondok di Danau | Kementerian PUPR, Kementerian KP | Pemda Prov. Jawa Tengah, Universitas |
| | | | Pengadaan lahan penampungan dan fasilitas pemanfaatan/ pengolahan eceng gondok yang | Pengembalian fungsi tampungan Air di Danau | Tersedianya lahan tampungan dan fasilitas pemanfaatan/ pengolahan eceng gondok | Pemda Prov. Jawa Tengah | Kementerian PUPR | |

diangkat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-79-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|---|---------|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | diangkat dari Danau | | | | | |
| 6. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.5. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Pengkayaan jenis-jenis ikan lokal pada perairan Danau | Meningkatnya populasi ikan lokal di Danau | Terlaksananya penebaran (<i>restocking</i>)/ introduksi ikan lokal di Danau, 1 paket kegiatan per tahun | Kementerian KP, Universitas | Kementerian LHK, LIPI, Pemda Prov. Jawa Tengah, Universitas |
| 7. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak pada pencemaran Air/kerusakan Ekosistem Danau | 3.6. | Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan zonasi lahan Sempadan Danau dan penentuan garis Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta memperhatikan batas dan fungsinya | Ditetapkannya zonasi lahan Sempadan Danau dan penentuan garis Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Jawa Tengah, Universitas |

sebagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-80-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---|------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | sebagai kawasan lindung | | | |
| | | | Pemasangan patok dan papan pengumuman batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Terpasangnya patok-patok batas dan papan pengumuman di sekeliling Danau dan tidak ada pembangunan alih fungsi lahan di daerah batas muka Air banjir tertinggi | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | Pembuatan tanggul, jalan inspeksi (<i>roadbelt</i>) dan <i>jogging track</i> ramah lingkungan, | Terlaksananya pemanfaatan Danau dan kawasan di sekitarnya yang | Terlaksananya pembangunan tanggul pembatas badan Air Danau, jalan inspeksi | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Pemda Prov. Jawa Tengah |

terpadu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-81-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|---|---------|---|--|--|---|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | terpadu dengan tutupan vegetasi di sekeliling Danau (<i>greenbelt</i>) | memperhatikan batas dan fungsi ekologisnya, serta terciptanya lingkungan yang nyaman bagi masyarakat | (<i>roadbelt</i>) dan <i>jogging track</i> ramah lingkungan, yang terpadu dengan vegetasi (<i>greenbelt</i>) di sekeliling Danau | | | |
| 8. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimen | 3.7. | Rehabilitasi hutan dan lahan dan pengendalian erosi sedimentasi di Daerah Tangkapan Air | Pembuatan bangunan konservasi tanah dan Air pengendali erosi | Terkendalinya erosi di Daerah Tangkapan Air Danau | Terlaksananya pembangunan 15 unit dam penahan, 50 unit <i>gully plug</i> (sebelumnya sudah terbangun 19 unit dam penahan, dan 94 unit <i>gully plug</i>) | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

Agroforestri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-82-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---------------------------------|---|--|------------------|-------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Agroforestri | Terkendalinya erosi dan laju aliran permukaan di Daerah Tangkapan Air Danau serta tetap tersedianya peluang usaha bagi masyarakat | Terlaksananya agroforestri seluas 250 hektar (sebelumnya sudah terlaksana 545 hektar agroforestri) | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | Pengembangan kebun bibit rakyat | Terkendalinya erosi dan laju aliran permukaan di Daerah Tangkapan Air Danau serta tetap tersedianya peluang usaha bagi masyarakat | Terlaksananya pengembangan 10 unit kebun bibit rakyat | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

Penanaman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-83-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---|------------------|-------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Penanaman bibit produktif tanaman-tanaman multi guna | Terkendalinya erosi dan laju aliran permukaan di Daerah Tangkapan Air Danau serta tetap tersedianya peluang usaha bagi masyarakat | Terlaksananya penanaman bibit produktif tanaman-tanaman multi guna sebanyak 25.000 batang di Kabupaten Semarang | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | Penghijauan lingkungan | Terkendalinya erosi dan laju aliran permukaan di Daerah Tangkapan Air Danau, tetap tersedianya peluang usaha bagi masyarakat, | Terlaksananya penanaman bibit tanaman kayu dan tanaman multi guna sebanyak 25.000 batang (dari Unit Pelayanan Teknis Kementerian LHK) dan 7.500 | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-84-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|---|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | dan pengendalian polusi udara | batang (dari dinas lingkungan hidup kabupaten) | | |
| | | | Konservasi kawasan lindung | Terkendalinya erosi dan laju aliran permukaan di Daerah Tangkapan Air Danau serta konservasi kawasan lindung | Penanaman bibit tanaman rimba campur pada lahan seluas 38,5 hektar di Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kedu Utara | Kementerian LHK | Perum Perhutani Jawa Tengah |
| | | | Konservasi sumber daya alam melalui penanaman tanaman keras | Terkendalinya erosi dan laju aliran permukaan di Daerah Tangkapan Air Danau danau | Terlaksananya penanaman tanaman keras | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

serta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-85-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|---|---|--|--|-----------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | serta konservasi sumber daya alam | | | | |
| | | 3.8. | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Fasilitasi pengelolaan lahan usaha tani secara ramah lingkungan | Terkendalnya erosi dan laju aliran permukaan di Daerah Tangkapan Air Danau serta tetap tersedianya peluang usaha bagi masyarakat | Terlaksananya 5 paket fasilitasi pengelolaan lahan usaha tani ramah lingkungan | Kementan | Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kedu Utara |
| | | | | Penyediaan bantuan usaha tani ramah lingkungan | Terkendalnya erosi dan laju aliran permukaan di Daerah Tangkapan Air Danau serta | Terlaksananya pemberian bantuan usaha tani ramah lingkungan berupa 10 paket ternak, 20 paket | Kementan | Pemda Prov. Jawa Tengah |

tetap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-86-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|---|---------|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | tetap tersedianya peluang usaha bagi masyarakat | bibit dan 20 paket pupuk untuk usaha tani ramah lingkungan | | | |
| | | | Pembinaan dan fasilitasi budi daya padi dan penanganan pasca panen ramah lingkungan | Terlaksananya kegiatan pertanian yang ramah lingkungan | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan budi daya padi dan penanganan pasca panen ramah lingkungan, bagi 5 angkatan petani pemakai Air Danau | Kementan | Pemda Prov. Jawa Tengah | |
| 8. | Pencemaran air dari kegiatan di Daerah | 3.9. | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan di | Pembinaan dan fasilitasi pertanian | Berkurangnya pencemaran Air Danau dari | Terlaksananya pembinaan bagi 5 kelompok tani | Kementan | Kementerian PUPR, Kementerian |

Tangkapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-87-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|----------------------------|---------|----------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | Tangkapan Air Danau | | Daerah Tangkapan Air Danau | dengan pupuk organik | kegiatan pertanian | serta fasilitasi pertanian dengan pupuk organik berupa 5 rumah kompos dan alat pengolah pupuk organik setiap tahun | | LHK, Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | | Pembangunan sistem pengelolaan Air limbah domestik di kawasan Daerah Tangkapan Air Danau | Terkendalnya pencemaran Air dari limbah penduduk di sekitar Danau | Terlaksananya pembangunan sistem pengelolaan Air limbah domestik dikawasan Daerah Tangkapan Air Danau | Kementerian PUPR, Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

9. Banyaknya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-88-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|-----------------------------------|---------|--------------------|--|--|---|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 9. | Banyaknya sampah di sekitar Danau | 3.10. | Pengelolaan sampah | Pembersihan sampah | Bersihnya kawasan sekitar Danau dari sampah | Terlaksananya paket pembersihan sampah di kawasan Danau | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | | Pembuatan tempat pemrosesan sampah | Bersihnya kawasan sekitar Danau dari sampah | Terbangunnya tempat penampungan sampah sementara | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | | Pembinaan masyarakat dan fasilitasi pembersihan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di sungai | Bersihnya kawasan sekitar Danau dari sampah dan membaiknya kualitas lingkungan hidup di sungai | Terlaksananya pembinaan masyarakat dan fasilitasi kegiatan bersih-bersih sampah dan peningkatan kualitas lingkungan di 10 sungai yang | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

bermuara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-89-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---|------------------|-------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | bermuara ke Danau | | |
| | | | Peningkatan layanan pengelolaan sampah | Bersihnya kawasan sekitar Danau dari sampah | Terlaksananya peningkatan layanan pengelolaan sampah di 5 desa | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | Peningkatan pengelolaan lingkungan berupa pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah serta penanaman bibit konservasi | Bersihnya dan meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan sekitar Danau | Terlaksananya pembangunan/ tersedianya sarana dan prasarana unit biogas, tempat pembuangan sampah dan kontainer sampah, tempat pengolahan sampah dengan prinsip <i>Reduce</i> , | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

Reuse ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|--|---------|--------------------------|--|---|---|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | <i>Reuse, dan Recycle (3R), gedung bank sampah dan sarana serta prasarananya, Instalasi Pengolahan Air Limbah, sumur resapan, serta penanaman batang tanaman konservasi</i> | | |
| | | | | Pembangunan drainase lingkungan permukiman | Terkendalinya pencemaran dari lingkungan permukiman | Terbangunnya drainase lingkungan permukiman | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| 10. | Perlu ditingkatkannya akses pemanfaatan air | 3.11. | Penyediaan sumber-sumber | Pembuatan sumur bor di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan | Terlayani dan tercukupinya kebutuhan Air bersih di | Terlaksananya pembuatan sumur bor di Kabupaten | Kementerian ESDM | Pemda Prov. Jawa Tengah |

bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-91-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|----------------|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | bagi masyarakat di Daerah Tangkapan Air Danau | Air masyarakat | bagi | Kabupaten Temanggung | Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung | Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung | | |
| | | | | Pembangunan sistem jaringan perpipaan distribusi Air bersih dari Danau | Terlayani dan tercukupinya kebutuhan Air bersih bagi masyarakat di sekitar Danau | Terbangun dan terpeliharanya sistem jaringan perpipaan distribusi Air bersih dari Danau | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 11. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaru | 4.1. | Pemantauan dan evaluasi | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau, antara lain: batimetri, neraca air, keanekaragaman | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Jawa Tengah | Pemda Prov. Jawa Tengah |

hayati ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-92-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | hayati, kondisi sempadan, Daerah Tangkapan Air Danau dan sosial ekonomi | | | |
| | | 4.2. | Pengembangan basis data dan sistem informasi | Pengembangan sistem informasi Danau | Terlaksananya pengelolaan Danau yang terintegrasi lintas Pemangku Kepentingan | Terhimpunnya data dan informasi Danau yang terbaru dan terinformasikan kepada para Pemangku Kepentingan | Pemda Prov. Jawa Tengah | Pemda Prov. Jawa Tengah, Universitas, LIPI |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 12. | Perlu dikembangkannya kelembagaan dan | 5.1. | Pengembangan destinasi wisata bagi masyarakat | Pengembangan kawasan Jembatan Biru | Terlaksananya pemanfaatan Danau dan kawasan di sekitarnya yang | Terlaksananya penataan dan pembangunan kawasan | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Jawa Tengah |

ditingkatkannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-93-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|----------------------------------|---------|---|---|--|------------------|-----------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | ditingkatkannya peran para pihak | | sebagai destinasi wisata | sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta terciptanya peluang usaha masyarakat yang ramah lingkungan | | | |
| | | | Pengembangan kawasan Bukit Cinta sebagai destinasi wisata | Terlaksananya pemanfaatan Danau dan kawasan di sekitarnya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta terciptanya peluang usaha masyarakat yang | Terlaksananya penataan dan pembangunan kawasan Bukit Cinta | Kementerian PUPR | |

ramah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-94-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | ramah lingkungan | | | |
| | | | Penyelenggaraan festival Danau | Terciptanya usaha masyarakat | Terlaksananya festival Danau | Pemda Prov. Jawa Tengah | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | Peningkatan peran dan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan Danau | Terkendalinya kerusakan ekosistem danau dan terciptanya usaha masyarakat | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi BUMDes, Posyantek dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan Danau | Pemda Prov. Jawa Tengah | |
| | | | Pembinaan masyarakat inovatif dan kreatif | Terkendalinya kerusakan ekosistem Danau | Terlaksananya pembinaan masyarakat | Pemda Prov. Jawa Tengah | |

dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-95-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|--|---------|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | dalam industri non-agro yang ramah lingkungan | dan terciptanya usaha masyarakat | inovatif dan kreatif dalam industri non-agro yang ramah lingkungan serta pengembangan jaringan pemasaran | | | |
| 13. | Perlu ditingkatkannya pola hidup masyarakat yang ramah lingkungan dan pro mitigasi/adaptasi perubahan iklim | 5.2. | Pembangunan kampung iklim | Pembinaan dan fasilitasi pembangunan kampung iklim | Meningkatnya pola hidup masyarakat yang ramah lingkungan | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pembangunan kampung iklim | Pemda Prov. Jawa Tengah | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| 14. | Pencemaran air dari kegiatan di Daerah | 5.3. | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan di | Pembinaan pengendalian pencemaran Air | Terkendalinya pencemaran Air dari berbagai | Terlaksananya pembinaan pengendalian | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

Tangkapan. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-96-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|--|---------|------------------------------|---|--|---|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | Tangkapan Air Danau | | Daerah Tangkapan Air Danau | bagi kegiatan usaha di sekitar Danau | kegiatan usaha di sekitar Danau | pencemaran Air bagi kegiatan usaha di sekitar Danau 2 kali setiap tahun | | |
| 15. | Perlu dikembangkan-nya kelembagaan dan ditingkatkannya peran para pihak | 5.4. | Peningkatan peran para pihak | Bimbingan teknis konservasi Danau bagi masyarakat di sekitar Danau | Meningkatnya peran masyarakat | Terlaksananya bimbingan teknis konservasi Danau serta penyuluhan kehutanan | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | | Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan masyarakat dalam penyelamatan Danau | Terkendalinya kerusakan Ekosistem Danau dan terciptanya usaha masyarakat | Terlaksananya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan masyarakat dalam penyelamatan | Kementerian LHK | Pemda Prov. Jawa Tengah |

Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-97-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | Danau setiap tahun | | |
| | | | Pelatihan dan uji kompetensi SDM untuk pariwisata Danau ramah lingkungan | Terkendalnya kerusakan Ekosistem Danau dan terciptanya usaha masyarakat | Dilaksanakannya pelatihan dan uji kompetensi SDM pariwisata danau ramah lingkungan | Pemda Prov. Jawa Tengah | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | Pembinaan kewirausahaan wisata ramah lingkungan bagi masyarakat di sekitar Danau | Terkendalnya kerusakan Ekosistem Danau dan terciptanya usaha masyarakat | Terlaksananya pembinaan kewirausahaan wisata ramah lingkungan di sekitar Danau | Pemda Prov. Jawa Tengah | Pemda Prov. Jawa Tengah |
| | | | Pembinaan masyarakat sadar wisata ramah lingkungan Danau | Terkendalnya kerusakan Ekosistem Danau dan terciptanya | Terlaksananya pembinaan masyarakat sadar wisata ramah | Pemda Prov. Jawa Tengah | Pemda Prov. Jawa Tengah |

usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-98-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|----------|------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | usaha masyarakat | lingkungan Danau | | |

7. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-99-

7. DANAU BATUR

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|----------------|--|---|---|-------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam penataan ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Direvisinya Rencana Tata Ruang Wilayah | Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara |
| | | | | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Danau | Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli |

Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-100-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|--|--|---|--|-------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, Pemda Kab. Bangli |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya Penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Kab. Bangli | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, |

Pemda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-101-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--------------------------------------|---------|--|---|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | | Pemda Kab. Bangli | |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan Danau, Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1 | Pengelolaan kualitas Air Danau | Penetapan kelas Air Danau | Pemanfaatan Air Danau sesuai dengan peruntukannya | Ditetapkan dan diimplementasikannya peraturan gubernur tentang kelas air danau | Pemda Kab. Bangli | Kementerian LHK, Pemda Kab. Bangli |
| | | 3.2. | Pengendalian pencemaran Air dari perikanan budi daya dengan keramba jaring apung | Pengembangan percontohan perikanan budi daya ramah lingkungan selain keramba jaring apung | Terbangunnya percontohan perikanan budi daya ramah lingkungan selain keramba jaring apung | Tersedianya sarana dan prasarana serta terlaksananya pelatihan penerapannya | Kementerian KP, Pemda Kab. Bangli | Kementerian LHK, LIPI, Pemda Kab. Bangli, Universitas |

3.3. Pengendalian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-102-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 3.3. Pengendalian pencemaran Air dari pertanian | Pembangunan percontohan pertanian organik terpadu | Berkurangnya pencemaran bahan kimia ke perairan Danau | Terwujudnya pertanian organik | Kementan | Kementerian LHK, Pemda Kab. Bangli |
| | | 3.4. Pengendalian pencemaran Air dari transportasi perairan | Penyediaan percontohan sarana dan prasarana transportasi ramah lingkungan | Berkurangnya pencemaran bahan bakar minyak/oli ke perairan Danau | Tersedianya percontohan kapal motor ramah lingkungan | Kementerian Perhubungan (Kemenhub) | Pemda Kab. Bangli |
| | | 3.5. Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR dan Pemda Kab. Bangli | Kementerian LHK, Pemda Kab. Bangli, Kementerian ESDM, Pelaku Usaha |

3.6. Pemulihan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-103-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|---|--|--|---|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | 3.6. | Pemulihan kualitas Air | Penyediaan sarana dan prasarana pemulihan kualitas Air | Terpuhikannya kualitas Air Danau | Tersedianya peralatan <i>nano bubble</i> | Kementerian LHK, Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli |
| | | | | Pembangunan kolam dan media purifikasi | Terpuhikannya kualitas Air Danau | Terbangunnya kolam dan media purifikasi | Kementerian LHK | Pemda Kab. Bangli |
| 4. | Banyaknya eceng gondok di Danau | 3.7. | Pengendalian dan pemanfaatan eceng gondok | Penyediaan sarana dan prasarana pemanfaatan eceng gondok | Berkurangnya limbah organik dan sebaran eceng gondok | Tersedianya sarana dan prasarana gerobak motor, perahu dan pengait, unit pencacah, pembuat pupuk padat dan pembuat pupuk cair | Kementerian LHK | Pemda Kab. Bangli |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-104-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------------------|---------|--|---|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Pembangunan pengolahan eceng gondok menjadi biogas | Berkurangnya limbah organik dan sebaran eceng gondok | Terbangunnya unit biogas | Pemda Kab. Bangli | Kementerian LHK, Kementerian PUPR | |
| | | 3.8. | Pengendalian eceng gondok | Pembersihan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Dilaksanakannya pembersihan eceng gondok | Kementerian PUPR | Pelaku Usaha |
| 5. | Sedimentasi Danau | 3.9. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen Danau yang memperhatikan kesehatan Ekosistem | Meningkatnya volume tampung perairan Danau | Terlaksananya pengerukan sedimen | Kementerian PUPR | Pemda Kab. Bangli |
| | | | Pemanfaatan sedimen | Meningkatnya volume tampung perairan Danau | Termanfaatkannya sedimen | Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli | |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-105-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|-----------------------------------|---|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembangunan tanggul yang memperhatikan Ekosistem | Menurunnya sedimen yang masuk ke Danau | Pembangunan tanggul | Kementerian PUPR | Pemda Kab. Bangli |
| 6. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.10. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Penebaran bibit (<i>restocking</i>) ikan asli/endemik dan pelarangan penebaran bibit ikan asing invasif | Lestarnya ikan asli/endemik di Danau | Tersebarinya bibit ikan asli/endemik dan tercegahnya introduksi/penebaran bibit (introduksi) ikan asing invasif | Pemda Kab. Bangli | |
| 7. | Pemanfaatan Air yang belum tertata | 3.11. | Penataan pemanfaatan Air | Pengadaan sistem distribusi Air terpadu | Terkelolanya pemanfaatan sumber daya Air Danau | Terbangunnya sistem distribusi Air terpadu | Kementerian PUPR | Pemda Kab. Bangli |
| | | | | Pengendalian penggunaan pompa Air | Pengambilan Air yang tertata dan | Terlaksananya penataan, pembinaan | Kementerian PUPR | Pemda Kab. Bangli |

ramah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-106-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | ramah lingkungan | masyarakat dan pemantauan pompa Air | | |
| 8. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/merusak Danau | 3.12. Penataan kawasan Sempadan Danau | Penentuan dan penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Bangli | Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN |
| | | 3.13. Pembangunan sarana dan prasarana di Sempadan Danau | Pembangunan dermaga dengan fasilitas pembuangan limbah yang memadai | Berkurangnya abrasi Danau | Terbangunnya dermaga | Pemda Kab. Bangli | Kemenhub |

9. Degradasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-107-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---------------------------------------|---------|---|--|--|--|------------------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 9. | Degradasi fungsi Daerah Aliran Sungai | 3.14. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Penyediaan sarana dan prasarana konservasi tanah dan Air | Penurunan laju erosi | Tersedianya <i>gully pug</i> , gulu dan, <i>drop strucker</i> , saluran deversi, dan <i>trap</i> sedimen | Kementerian LHK | Pemda Kab. Bangli |
| | | | | Reboisasi dan penghijauan | Penurunan laju erosi dan luas lahan kritis | Tertanamnya pohon reboisasi | Kementerian LHK, Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli |
| | | | | Pembangunan terasering | Penurunan laju erosi | Terbangunnya terasering | Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli |
| | | | | Pembangunan beronjong di alur sungai | Penurunan laju erosi dan sedimentasi | Terbangunnya beronjong | Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli |
| | | 3.15. | Pembangunan infrastruktur pengendali erosi/sedimen dan drainase | Pembangunan bangunan penahan sedimen | Penurunan laju erosi, sedimentasi dan dampak banjir di sekitar Danau | Terbangunnya bangunan penahan sedimen | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian Dikbudristek, BRIN |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-108-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|--|---------|---|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembangunan drainase | Berkurangnya kejadian banjir | Terbangunnya drainase di kawasan permukiman | Kementerian PUPR | Pemda Kab. Bangli |
| 10. | Kerusakan lahan Daerah Tangkapan Air akibat pertambangan batuan | 3.16. | Pengendalian kerusakan lahan akibat pertambangan batuan | Penyusunan peraturan gubernur tentang moratorium pertambangan batuan di daerah tangkapan air danau | Peningkatan kualitas sumber daya lahan di Daerah Tangkapan Air Danau | Tersusun dan tersosialisasikan-nya peraturan gubernur | Pemda Kab. Bangli | Kementerian ESDM, Pemda Kab. Bangli |
| 11. | Perambahan hutan di Daerah Tangkapan Air Danau | 3.17. | Pengendalian perambahan hutan | Pembinaan dan patroli keamanan pencegahan perambahan hutan | Penurunan perambahan 10% eksisten per tahun | Terlaksananya pembinaan dan patroli rutin 2 kali dalam setahun | Kementerian LHK, Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli |

12. Sampah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-109-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|--|--------------------------|--|---|--|--|-------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| 12. | Sampah yang belum terkelola dengan baik | 3.18. Pengelolaan sampah | Penyediaan prasarana pengelolaan sampah permukiman di | Berkurangnya sampah yang masuk ke Danau | Terbangunnya tempat pengolahan sampah dengan prinsip <i>Reduce</i> , <i>Reuse</i> , dan <i>Recycle</i> (3R), bank sampah dan truk sampah | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Kab. Bangli | Pemda Kab. Bangli |
| | | | Penyediaan prasarana pengelolaan sampah di Taman Wisata Alam | Berkurangnya sampah yang masuk ke Danau | Terbangunnya tempat pengolahan sampah dengan prinsip <i>Reduce</i> , <i>Reuse</i> , dan <i>Recycle</i> (3R) di Taman Wisata Alam | Kementerian LHK | Pemda Kab. Bangli |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-110-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | | |
|---|---|---------|-------------------------------|---|--|--|--------------|------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | | |
| 13. | Perlu ditingkatkannya pemantauan, evaluasi serta basis data dan sistem informasi | 4.1. | Pemantauan Air Danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau antara lain batimetri, neraca Air, kualitas Air, keanekaragaman hayati, kondisi Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air Danau, serta sosial ekonomi | Pemda Bangli | Kab. | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, LIPI, Pemda Kab. Bangli |
| | | 4.2. | Pengembangan sistem informasi | Pembuatan <i>data base</i> dan sistem informasi danau | Tersedianya kemudahan akses informasi data Danau | Tersedianya sistem informasi Danau | Pemda Bangli | Kab. | Pemda Kab. Bangli |

Strategi 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-111-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---|---|--|---|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | |
| 14. | Belum adanya kelembagaan yang menyatukan kepedulian para Pemangku Kepentingan | 5.1. Pengembangan kapasitas kelembagaan | Penguatan forum peduli Danau | Meningkatnya koordinasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan Danau | Terselenggaranya pembinaan 1 kali dalam setahun | Kementerian LHK | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Bangli |
| | | | Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam perikanan budi daya di Perairan Umum Daratan (PUD) | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perikanan budi daya di PUD | Terbentuk dan terbinanya kelompok masyarakat | Pemda Kab. Bangli | |
| | | | Pelaksanaan sekolah lapang | Berkurangnya pencemaran | Terlaksananya sekolah lapang | Pemda Kab. Bangli | Kementerian LHK, Pemda Kab. Bangli |

Pertanian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-112-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | pertanian ramah lingkungan | bahan kimia ke perairan Danau | kelompok masyarakat | | |
| | | | Pelibatan masyarakat dalam pembersihan eceng gondok | Berkurangnya sebaran eceng gondok | Terlaksananya pembersihan eceng gondok 2 kali dalam setahun | Pemda Kab. Bangli | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Pemda Kab. Bangli |

8. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-113-

8. DANAU TONDANO

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|----------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Belum terkendalinya kegiatan pemanfaatan ruang Danau | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan Danau | Tersusun dan terlaksananya rencana rinci tata ruang Danau | Ditetapkannya rencana rinci tata ruang Danau | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkannya zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, |

Pemda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-114-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | Pemda Kab. Minahasa |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. Pengintegrasian penyelamatan Danau prioritas nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Kab. Minahasa | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, Pemda Kab. Minahasa |

Strategi 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-115-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--------------------------------------|---------|--|--|--|--|----------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Sempadan, Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. | Pengelolaan kualitas Air Danau | Pemantauan kualitas Air | Tersedianya data dan informasi kualitas Air bagi acuan pengelolaan | Dilaksanakannya pemantauan kualitas Air secara berkala | Pemda Minahasa | Kab. Kementerian LHK, LIPI, dan Universitas |
| | | 3.2. | Pengendalian pencemaran Air dari limbah rumah tangga | Revitalisasi dan pembangunan baru sistem <i>septic tank</i> komunal sistem | Meningkatnya kualitas Air Danau | Terlaksananya revitalisasi <i>septic tank</i> komunal di 1 desa dan pembangunan <i>septic tank</i> komunal | Pemda Minahasa | Kab. Kementerian PUPR |
| | | | | Pembangunan pengolahan limbah rumah tangga menjadi biogas | Meningkatnya kualitas Air Danau | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pengolahan limbah menjadi biogas | Pemda Minahasa | Kab. Kementerian LHK |

3.3. Pengendalian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-116-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|--|---|---------------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 3.3. Pengendalian pencemaran Air dari kegiatan pertanian | Pengembangan dan pembinaan pertanian ramah lingkungan | Meningkatnya kualitas Air Danau | Terlaksananya pengembangan dan pembinaan pertanian ramah lingkungan | Pemda Kab. Minahasa | Kementerian Pertanian, Kementerian LHK |
| | | 3.4. Pengendalian pencemaran Air dari kegiatan perikanan budi daya | Pembatasan jumlah dan area perikanan budi daya, serta pengembangan, sosialisasi dan implementasi desain keramba jaring apung ramah lingkungan | Meningkatnya kualitas Air | Terlaksananya pembatasan jumlah dan area perikanan budi daya, serta pengembangan, sosialisasi dan implementasi desain keramba jaring apung ramah lingkungan dan penurunan | Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa, Kementerian KP, LIPI, Universitas |

Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-117-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|-------------------------------------|---------|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | jumlah keramba jaring apung | | | |
| | | 3.5. | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Minahasa | Kementerian LHK, Pemda Kab. Minahasa, Kementerian ESDM, Pelaku Usaha |
| 4. | Banyaknya gulma Air di Danau | 3.6. | Pengendalian dan pemanfaatan gulma Air | Pembersihan dan pemanfaatan gulma Air menjadi pupuk, pakan dan biogas | Terkendalnya gulma Air | Dilaksanakannya pembersihan eceng gondok | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Minahasa | Kementerian LHK |
| | | | | Pembangunan dermaga dan dumping area gulma Air | Terkendalnya gulma Air | Dibangunnya dermaga dan dumping area gulma Air | Pemda Kab. Minahasa | Kementerian LHK, Kementerian PUPR |

5. Banyaknya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-118-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| 5. | Banyaknya sampah di Danau dan sekitarnya | 3.7. Pengelolaan sampah | Penyusunan, sosialisasi dan implementasi surat keputusan bupati tentang pengelolaan sampah di Danau dan sekitarnya | Terkelolanya sampah di Danau dan sekitarnya | Ditetapkan dan diimplementasi-kannya surat keputusan bupati tentang pengelolaan sampah di sekitar Danau | Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa |
| | | | Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah | Terkelolanya sampah di Danau dan sekitarnya | Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah | | |
| 6. | Sedimentasi Danau | 3.8. Pengendalian sedimentasi Danau | Revitalisasi Danau | Terkendalinya sedimentasi Danau | Terlaksananya revitalisasi Danau (lanjutan program) | Pemda Kab. Minahasa | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Minahasa |

Pengerukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-119-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pengerukan sedimen | Terkendalinya sedimentasi Danau | Bertambah luas badan Air Danau dan kedalaman rata-rata Danau menjadi lebih dalam | Pemda Kab. Minahasa | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Minahasa |
| | | | Pembangunan cek dam pengendali sedimen | Terkendalinya sedimentasi Danau | Terlaksananya pembangunan cek dan pengendali sedimen | Pemda Kab. Minahasa | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Minahasa |
| 7. | Lahan Sempadan Danau yang tidak tertata | 3.9. Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai dengan peraturan yang berlaku | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Pelaku Usaha |
| | | | Penertiban dan relokasi bangunan | Pemanfaatan Sempadan | Tidak ada lagi bangunan yang | Pemda Kab. Minahasa | Kementerian ATR/BPN, |

illegal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-120-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|-------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | ilegal di Sempadan Danau | Danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | menyalahi aturan di Sempadan Danau | | Pemda Kab. Minahasa |
| | | | Penanaman pohon batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Tertanamnya pohon pembatas di Sempadan Danau | Kementerian LHK, Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa, Kementerian PUPR |
| 8. | Banjir di sekitar Danau | 3.10. Penanggulangan banjir | Pembangunan <i>greenbelt</i> dan pemeliharaan <i>natural area</i> peresapan Air dan | Tertanggulangi-nya banjir | Dilaksanakannya pembangunan <i>greenbelt</i> (dengan penanaman di Sempadan Danau) serta | Kementerian PUPR, Kementerian LHK dan Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa |

kolam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-121-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | kolam penyimpan Air | | | | |
| | | | | Survei, investigasi, pembuatan desain dan pembangunan drainase dan tanggul pengendali banjir di permukiman | Tertanggulangi-nya banjir | Terlaksananya survei, investigasi, pembuatan desain dan pembangunan drainase dan tanggul pengendali banjir di permukiman | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa |
| 9. | Tingginya laju erosi, <i>run off</i> dan sedimentasi dari Daerah Tangkapan Air Danau | 3.11. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Pembuatan bangunan sipil teknis | Penurunan laju erosi | Dilaksanakannya pembuatan bangunan sipil teknis pengendali erosi di Daerah | Kementerian LHK | Pemda Kab. Minahasa |

Tangkapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-122-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|-------------------------------------|--|--|---|---|---------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | Tangkapan Air Danau | | |
| | | | | Reboisasi dan penghijauan | Penurunan laju erosi dan luas lahan kritis | Penanaman vegetasi pengendali erosi hingga mencapai minimal 30% luas Daerah Tangkapan Air Danau | Kementerian LHK | Pemda Kab. Minahasa |
| Strategi 4. Penerapan Hasil, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 10. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaharui | 4.1. | Pengembangan sistem informasi Danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau, antara lain: batimetri, neraca Air, keanekaragaman hayati, kondisi sempadan | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, BPPT, BIG dan BPS | Pemda Kab. Minahasa |

Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-123-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | Danau, Daerah Tangkapan Air Danau, dan sosial ekonomi | | |
| | | 4.2. Pengembangan sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Terwujudnya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Tersedianya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Tersedianya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas | Pemda Kab. Minahasa |
| 11. | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Danau | 4.3. Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Danau | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif dan efisien | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi | Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-124-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|----------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 12. | Perlu dikembangkan-nya kelembagaan dan ditingkatkannya peran para pihak | 5.1. | Pengembangan kelembagaan terpadu | Pembentukan kelembagaan terpadu penyelamatan Danau | Pengelolaan terkoordinasi para pihak | Terbentuknya kelembagaan pengelolaan Danau yang melibatkan para pihak terkait | Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa |
| | | 5.2. | Peningkatan peran para pihak | Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan para pihak lainnya | Masyarakat dan para pihak lainnya terlibat aktif | Terwujudnya pariwisata yang melibatkan peran masyarakat dan para pihak lainnya | Pemda Kab. Minahasa | Pemda Kab. Minahasa |

9. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-125-

9. DANAU KASKADE MAHAKAM (SEMAYANG-MELINTANG-JEUMPANG)

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|---|---|---|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Belum terkendalinya kegiatan pemanfaatan ruang Danau | 1.1. | Optimalisasi Penataan Ruang Kawasan Danau | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Danau | Tersusun dan terlaksananya Rencana Rinci Tata Ruang Danau | Ditetapkannya Rencana Rinci Tata Ruang Danau | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai | Tersusun dan ditetapkannya zonasi badan Air | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, |

fungsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-126-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | fungsi Ekosistem Danau | dan Sempadan Danau | | Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Kalimantan Timur | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya Penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, dan Pemda Prov. Kalimantan Timur |

Strategi 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-127-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--------------------------------------|---------|--|---|--|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. | Pengelolaan kualitas Air | Pemantauan kualitas Air | Tersedianya data dan informasi kualitas Air bagi acuan pengelolaan | Dilaksanakannya pemantauan kualitas Air secara berkala | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, LIPI, Universitas |
| | | 3.2. | Pengendalian Pencemaran Air dari limbah ikan | Pelatihan pengolahan limbah ikan menjadi pakan ikan | Meningkatnya kualitas Air Danau | Dilaksanakannya pelatihan di tiap desa dan terbangunnya rumah pelatihan | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | 3.3. | Pengendalian pencemaran Air dari limbah rumah tangga | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal | Meningkatnya kualitas Air danau | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur |

3.4 Pengendalian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-128-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | 3.4. | Pengendalian pencemaran Air dari limbah transportasi perairan dan bengkel | Pembangunan pengolahan limbah transportasi dan bengkel | Meningkatnya kualitas Air Danau | Terbangunnya bengkel | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | 3.5. | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Pelaku Usaha, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| 4. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang | 3.6. | Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai dengan | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Pelaku Usaha |

tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-129-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|-------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | tidak tertata, dan berdampak pada pencemaran Air/kerusakan Ekosistem Danau | | | peraturan yang berlaku | | | |
| 5. | Banyaknya sampah di Danau dan sekitarnya | 3.7. Pengelolaan sampah | Penyediaan tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir serta pembentukan bank sampah | Terkelolanya sampah di sekitar Danau | Tersedianya tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir serta terbentuknya bank sampah di tiap desa, saat ini belum ada tempat penampungan | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur |

sementara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-130-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | sementara, tempat pemrosesan akhir dan bank sampah | | |
| | | | | Konversi sampah ke biogas | Terkelolanya sampah di sekitar Danau | Tersedianya biodigester | Pemda Kalimantan Timur | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | | | Pelatihan <i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i> (3R) | Terkelolanya sampah di sekitar Danau | Terlaksananya pelatihan pengolahan sampah dengan prinsip sistem <i>Reduce, Reuse,</i> | Pemda Kalimantan Timur | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur |

dan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-131-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | dan <i>Recycle</i> (3R) di tiap desa | | |
| 6. | Banyaknya limbah kayu di Danau | 3.8. Pengelolaan limbah kayu | Pemanfaatan limbah kayu untuk diolah menjadi berikat dan arang | Menurunnya limbah kayu di Danau | Terbangunnya pusat pengolahan limbah kayu menjadi berikat dan arang | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| 7. | Banyaknya gulma air di Danau | 3.9. Pengendalian gulma air | Pengendalian gulma air | Terkendalinya pertumbuhan gulma air | Berkurangnya tutupan Danau dari gulma air | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |

Pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-132-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|---|---|---|--|---|------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Pemanfaatan gulma air | Pemanfaatan gulma air untuk kegiatan ekonomi masyarakat | Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan gulma air untuk pakan ternak, pakan ikan dan pupuk kompos | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur | |
| 8. | Meningkatnya pendangkalan/ sedimentasi Danau dan menyempitnya alur sungai | 3.10. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen pada muara sungai yang mengarah ke Danau | Berkurangnya pendangkalan/ penyempitan Danau dan sungai | Dilaksanakannya pengerukan sedimen | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | | Pemanfaatan sedimen untuk media pertanian | Berkurangnya pendangkalan/ penyempitan | Pemanfaatan sedimen sebanyak secara | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. | Pemda Prov. Kalimantan Timur | |

Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-133-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---|---|--|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Danau dan sungai | bertahap dalam waktu 5 tahun | Kalimantan Timur | |
| 9. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.11. Pelestarian keanekaragaman hayati | Rehabilitasi kolam reservat ikan | Pulihnya reservat ikan | Terpulihkannya kedalaman 50% reservat, saat ini seluruh reservat mengalami pendangkalan sehingga tidak mampu mendukung kehidupan dan pemijahan ikan | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian KP, LIPI, Pemda Prov. Kalimantan Timur, Universitas |
| | | | Pengaturan penangkapan ikan dan pembinaan pengalihan usaha kelompok masyarakat ke | Terwujudnya perikanan, budi daya maupun tangkap, yang ramah lingkungan | Berkurangnya <i>illegal fishing</i> sampai 80% dari kondisi sekarang (saat ini banyak ditemukan <i>illegal</i> | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian KP, LIPI, Pemda Prov. Kalimantan Timur Universitas |

budi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-134-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | budi daya ikan ramah lingkungan | | <i>fishing</i> di seluruh lokasi Danau)S | | |
| | | | Penebaran benih ikan | Meningkatnya produktivitas perikanan | Peningkatan jenis dan kelimpahan ikan 45% dari kondisi sekarang | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian KP, LIPI, Pemda Prov. Kalimantan Timur, Universitas |
| | | | Pengendalian budi daya ikan invasif (ikan toman) | Perlindungan spesies asli/endemik | Berkurangnya keramba jaring apung budi daya ikan toman sebanyak 80% dari yang ada saat ini | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian KP, LIPI, Pemda Prov. Kalimantan Timur Universitas |
| | | | Penyuluhan konservasi fauna endemik | Konservasi spesies asli/endemik | Terlaksananya sosialisasi dan implementasi | Kementerian LHK, Pemda Prov. | Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan |

konservasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-135-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|--|---------|-----------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | konservasi fauna endemik | Kalimantan Timur | Timur, Pelaku Usaha | |
| 10. | Berkurangnya vegetasi bagi habitat biota dan pengendali gelombang di perairan Danau | 3.12. | Revegetasi daerah reservat | Penanaman pohon lokal | Terpulihkannya kawasan reservat Danau | Revegetasi dengan bibit pohon | Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur, Pelaku Usaha |
| | | | Revegetasi perlindungan gelombang | Pembuatan pulau dan penanaman di sekitar muara desa | Terbangunnya kawasan perlindungan dari gelombang air | Ditanamnya pohon hingga 70 % kawasan permukiman di sekitar Danau memiliki penahan gelombang air | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur |

11. Meningkatnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-136-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| 11. | Meningkatnya banjir dan kekeringan | 3.13. Penanggulangan banjir dan kekeringan | Pembangunan pos pemantauan hidrologi, terutama curah hujan dan tinggi muka air | Tertanggulangnya banjir dan kekeringan | Terbangunnya pos pemantauan hidrologi dan tersedianya data penanggulangan banjir melalui alat pengukur tinggi muka Air | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur, Pelaku Usaha |
| | | | Penyuluhan penanggulangan banjir dan kekeringan | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan resiko banjir dan kekeringan | Terlaksananya penyuluhan | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur, Pelaku Usaha |
| | | | Pembangunan Pos Evakuasi | Berkurangnya dampak bencana | Terbangunnya pos evakuasi | BPBD Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda |

di kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-137-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|--|------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | di kawasan Danau | | | Prov. Kalimantan Timur |
| | | | Pembentukan Tim Reaksi Cepat | Berkurangnya dampak bencana di kawasan Danau | Terbentuknya Tim Reaksi Cepat | Pemda Kalimantan Timur | Prov. Kalimantan Timur, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | | Pembangunan pengaman gelombang (fisik) | Berkurangnya dampak bencana di kawasan Danau | Terbangunnya pengaman gelombang | Pemda Kalimantan Timur | Prov. Kalimantan Timur, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | | Fasilitasi dan pembinaan pengolahan ikan | Berkurangnya dampak bencana di kawasan | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan | Pemda Kalimantan Timur | Prov. Kalimantan Timur, Kementerian LHK, Kementerian |

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-138-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | yang potensial mati massal | Danau dan peningkatan nilai ekonomi | pengolahan ikan di 10 desa | | PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| 12. | Degradasi fungsi Daerah Aliran Sungai | 3.14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Penyusunan rencana rehabilitasi lahan kritis di Daerah Tangkapan Air Danau | Peningkatan kondisi Daerah Tangkapan Air Danau | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | | Pengawasan pembukaan lahan dan penerapan <i>zero burning</i> | Terkendalinya kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau akibat kebakaran lahan | Tersusun, tersosialisasi dan diimplementasi-kannya rencana tindak pengawasan kegiatan pembukaan lahan dan | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur |

Penerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-139-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---|---|--|--|------------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | penerapan <i>zero burning</i> | | |
| | | 3.15. Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Pengembangan peta potensi pertanian | Berkembangnya pertanian ramah lingkungan | Tersedianya peta potensi pertanian dan rencana pengelolaan pertanian | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur, Pelaku Usaha |
| | | | Pembuatan saluran pembuang air di sawah/rawa terutama di Tubuhan dan Kahala | Berkurangnya beban pencemaran | Terbangunnya saluran pembuang di sawah/rawa terutama di Tubuhan dan Kahala | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | | Pemanfaatan kompos dan herbisida organik | Berkurangnya beban pencemaran | Tersedianya kompos dan herbisida organik | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |

Pengendalian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-140-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Pengendalian limbah pertanian untuk mengurangi kesuburan perairan | Berkurangnya beban pencemaran | Terkelolanya limbah pertanian | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 13. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaharui | 4.1. | Pengembangan sistem informasi Danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau, meliputi: batimetri, neraca Air, keanekaragaman hayati, kondisi Sempadan Danau, Daerah Tangkapan Air dan sosial ekonomi | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, BPPT, BIG, BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-141-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pengembangan sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Terwujudnya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Tersedianya sistem informasi dan monitoring dan evaluasi pengelolaan Danau berkelanjutan | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, BPPT, BIG, Kementerian PPN/Bappenas, BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Universitas |
| 14. | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Danau | 4.2. | Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Danau | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif dan efisien | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi | Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 15. | Perlu ditingkatkannya peran serta para pihak | 5.1. | Peningkatan peran serta masyarakat | Fasilitasi pelaksanaan kegiatan konservasi Danau | Meningkatnya peran serta masyarakat | Terlaksananya kegiatan konservasi Danau berbasis masyarakat | Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |

berbasis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-142-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | berbasis masyarakat | | | | |
| | | | Penyuluhan dan pembuatan percontohan ekowisata dan pembangkitan budaya lokal dengan memanfaatkan tanggung jawab sosial perusahaan | Meningkatnya peran serta masyarakat | Terlaksananya penyuluhan dan pembuatan percontohan ekowisata dan pembangkitan budaya lokal dan terlaksananya program/ kegiatan ekowisata | Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |
| | | 5.2. Peningkatan sanitasi lingkungan | Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi | Meningkatnya sanitasi lingkungan | Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. | Pemda Prov. Kalimantan Timur |

Kalimantan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-143-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | Kalimantan Timur | |
| | | 5.3. | Pengembangan perekonomian ramah lingkungan | Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ramah lingkungan | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap ramah lingkungan | Terbentuk dan aktifnya kegiatan UMKM | Kementerian LHK, Pemda Prov. Kalimantan Timur | Pemda Prov. Kalimantan Timur |

10. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-144-

10. DANAU SENTARUM

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|------------------|---|---|---|---|------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau terkait lokasi wisata, kawasan gambut, dan zona khusus | Kementerian LHK, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| 2. | Belum optimalnya penataan kawasan di sekitar Danau | 1.2. | Penataan Kawasan | Penataan batas administratif desa | Terwujudnya batas administratif desa | Terlaksananya penataan batas administratif di kawasan Danau | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan | Tersusun dan ditetapkan zonasi badan Air | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian |

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-145-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | dan Sempadan Danau | Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | dan Sempadan Danau | | KP, Kementerian ATR/BPN, Pemda Kab. Kapuas Hulu | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 3. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya Penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, Pemda Kab. Kapuas Hulu |

Strategi 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-146-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|---|---------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 4. | Penurunan kualitas Air dan eutrofikasi | 3.1 | Pengelolaan kualitas Air | Pemantauan kualitas Air | Tersedianya sarana prasarana pemantauan kualitas Air yang baik | Terlaksananya pemantauan kualitas Air secara berkala | Pemda Kab. Kapuas Hulu | LIPI |
| | | 3.2. | Pengendalian eceng gondok | Pembersihan eceng gondok | Terkendalinya eceng gondok di Danau | Terlaksananya pengurangan tutupan oleh eceng gondok | Kementerian PUPR, Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| 5. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.3. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Pengembangan suaka perikanan (reservat) di Danau dan penebaran kembali (<i>restocking</i>) ikan asli danau | Berkembangnya populasi ikan asli Danau | Tersedianya suaka perikanan serta tersedianya benih ikan lokal untuk <i>restocking</i> bibit ikan endemik | Kementerian KP, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, LIPI, Pemda Kab. Kapuas Hulu, Universitas |

Rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-147-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Rehabilitasi habitat perikanan/ reservat | Meningkatnya populasi ikan endemik | Terlaksananya rehabilitasi habitat perikanan/ reservat | Kementerian KP, Pemda Kab. Kapuas Hulu, Universitas | Kementerian LHK, LIPI, Pemda Kab. Kapuas Hulu, Universitas |
| 6. | Penurunan produksi perikanan secara umum | 3.4. | Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan | Penyusunan peraturan tentang perikanan berkelanjutan | Terwujudnya perikanan berkelanjutan | Tersusun, ditetapkan, dan diimplementasi-kannya aturan perikanan berkelanjutan | Kementerian KP, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, LIPI, Pemda Kab. Kapuas Hulu, Universitas |
| | | | | Pengelolaan perikanan tangkap berbasis budaya (<i>culture based fishery</i>) | Terwujudnya perikanan tangkap ramah lingkungan | Dikembangkan-nya perikanan tangkap berbasis budaya pada lokasi perikanan tangkap | Kementerian KP, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, LIPI, Pemda Kab. Kapuas Hulu, Universitas |

Kampanye ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-148-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | Kampanye perikanan tangkap ramah lingkungan | Terwujudnya perikanan tangkap ramah lingkungan | Terlaksananya kampanye perikanan tangkap ramah lingkungan | Kementerian KP, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, Pemda Kab. Kapuas Hulu, Universitas |
| 7. | Rendahnya produktifitas perikanan budi daya | 3.5. Pengembangan perikanan budi daya ramah lingkungan | Pengembangan dan pengelolaan kawasan perikanan budi daya Air tawar | Terwujudnya perikanan budi daya ramah lingkungan | Terwujudnya pengelolaan perikanan budi daya Air tawar secara ramah lingkungan | Kementerian KP, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, LIPI, Pemda Kab. Kapuas Hulu, Universitas | |
| 8. | Lahan kritis, erosi dan sedimentasi di Daerah Tangkapan Air Danau | 3.6. Rehabilitasi hutan dan lahan | Rehabilitasi lahan gambut | Menurunnya kerusakan lahan gambut di Daerah Tangkapan Air Danau | Meningkatnya tutupan vegetasi | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu | |

9. Kerusakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-149-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|--|---|--|--|---|------------------|------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| 9. | Kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan | 3.7. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Patroli perlindungan, pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan | Menurunnya 20% <i>hotspot</i> dan 10% luas kebakaran di 6 <i>resort</i> Taman Nasional Danau Sentarum dan lokasi rawan kebakaran | Terlaksananya patroli kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Danau Sentarum dan lokasi rawan kebakaran | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | | Pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api dalam pengendalian kebakaran hutan | Terkendalinya kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan | Terbentuknya kelompok Masyarakat Peduli Api dan terlaksananya kegiatan pembinaan | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| 10. | Penebangan dan perburuan liar | 3.8. Pengendalian penebangan dan perburuan liar | Patroli perlindungan dan pengamanan | Terkendalinya penebangan dan perburuan liar | Terlaksananya patroli penebangan liar selama 5 tahun | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

Penebangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-150-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|--|---------|---|--|---|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | penebangan dan perburuan liar | | untuk penebangan dan perburuan liar | | |
| 11. | Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertanian/ perkebunan yang tidak ramah lingkungan | 3.9. | Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan perkebunan | Penilaian pengelolaan lingkungan bagi usaha perkebunan | Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha perkebunan | Terlaksananya penilaian pengelolaan lingkungan | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | | | Penyediaan pupuk organik | Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha perkebunan | Tersedianya pupuk organik di sekitar Danau | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

Kampanye ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-151-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|--|--------------------------|--|--|---|---|---|------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | Kampanye kegiatan pertanian ramah lingkungan | Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian | Terlaksananya kampanye di sekitar Danau | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| 12. | Belum optimalnya pengelolaan sampah | 3.10. Pengelolaan sampah | Pembangunan tempat pengelolaan sampah <i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i> (3R) | Terkelolanya sampah di Danau dan sekitarnya | Terbangunnya tempat pengelolaan sampah <i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i> (3R) | Terbangunnya tempat pengelolaan sampah <i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i> (3R) | Kementerian LHK, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | | | Pembangunan wadah sampah desa | Terkelolanya sampah di Danau dan sekitarnya | Terbangunnya wadah sampah desa | Kementerian LHK, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

13. Rendahnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-152-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|--|---------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| 13. | Rendahnya sanitasi di sekitar Danau | 3.11. | Peningkatan sanitasi | Sosialisasi sanitasi dan lingkungan sehat | Meningkatnya sanitasi di sekitar Danau | Terlaksananya sosialisasi sanitasi per tahun | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | | | Pembangunan jamban keluarga | Meningkatnya sanitasi di sekitar Danau | Tersedianya jamban keluarga | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | 3.12. | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, Pemda Kab. Kapuas Hulu, Kementerian ESDM, Pelaku Usaha |
| 14. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak pada | 3.13. | Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai dengan | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Pelaku Usaha |

Pencemaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-153-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--|---------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | pencemaran Air/kerusakan Ekosistem Danau | | | peraturan yang berlaku | | | | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 15. | Belum adanya kajian ilmiah potensi sumber daya ikan di perairan Danau | 4.1. | Pengembangan kajian ilmiah potensi sumber daya ikan di perairan Danau | Pelaksanaan kajian ilmiah potensi sumber daya ikan | Tersusunnya kajian potensi sumber daya ikan di perairan Danau | Terlaksananya kajian ilmiah potensi sumber daya ikan | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| 16. | Belum adanya data dan informasi sumber pencemaran Danau | 4.2. | Inventarisasi sumber pencemaran Danau | Inventarisasi dan pemantauan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan khususnya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit | Meningkatnya kualitas Air di sekitar Danau | Tersedianya data sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit 2 kali setiap tahun | Pemda Kab. Kapuas Hulu | LIPI |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-154-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|--|--|--|--|---|---|------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| 17. | Penurunan produksi perikanan secara umum | 4.3. Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan | Pemantauan dan evaluasi serta patroli perikanan tangkap ramah lingkungan | Terwujudnya perikanan tangkap ramah lingkungan | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penangkapan ikan serta diperolehnya data dan informasi insiden setiap tahun, dengan jumlah hari patroli 25 hari per tahun | Kementerian LHK, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| 18. | Lahan kritis, erosi dan sedimentasi di Daerah Tangkapan Air Danau | 4.4. Rehabilitasi hutan dan lahan | Pelaksanaan <i>impact assessment</i> rehabilitasi hutan dan lahan | Terwujudnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang efektif | Tersedianya data kepekaan erosi dan laju sedimentasi | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

19. Belum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-155-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|---------|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 19. | Belum tersedianya informasi kawasan | 4.5. | Penyusunan peta kawasan | Penyusunan peta wisata Danau dan sekitarnya | Tersedianya informasi kawasan Danau | Tersusunnya peta wisata Danau dan sekitarnya | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, Kementerian DPDTT |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 20. | Belum optimalnya peran para Pemangku Kepentingan | 5.1. | Peningkatan peran para pihak | Koordinasi dan fasilitasi forum Danau setempat | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksananya koordinasi para Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan Danau | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| 21. | Belum tertata dan terkoordinasi-nya pengelolaan Danau | 5.2. | Koordinasi Pengelolaan Danau | Penyusunan peraturan tentang perlindungan, pengelolaan dan pemulihan Ekosistem Danau | Terwujudnya pengelolaan danau yang tertata dan terkoordinasi | Tersusun, ditetapkan, tersosialisasi dan diimplementasi-kannya peraturan | Kementerian LHK, Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

tentang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-156-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|---|---------|--|---|--|--|------------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | tentang perlindungan, pengelolaan dan pemulihan Ekosistem Danau | | |
| | | | | Monitoring dan evaluasi terpadu para Pemangku Kepentingan | Terwujudnya pengelolaan danau yang tertata dan terkoordinasi | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terpadu minimal 2 kali dalam setahun | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| 22. | Belum optimalnya kapasitas dan peran serta masyarakat di sekitar Danau | 5.3. | Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat | Pengadaan Pembangunan Listrik Tenaga Surya untuk masyarakat perdesaan | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Tersedianya listrik dan penerangan | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian LHK, Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | | | Pengembangan agroforestri, budi daya lebah madu dan Hasil Hutan | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam | Terlaksananya pengembangan agroforestri, budi | Kementerian LHK | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

Bukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-157-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|---|---|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Bukan Kayu (HHBK) | pengembangan agroforestri, budi daya lebah madu dan HHBK | daya lebah madu dan HHBK | | |
| | | | Pengembangan peternakan dengan bibit unggul | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam usaha peternakan | Terlaksananya pengembangan peternakan melalui penyediaan bibit unggul ternak | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | | Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran produk perikanan | Terlaksananya kegiatan pembinaan, serta pemberian sarana dan prasarana kantor usaha bersama | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

Pembentukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-158-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat pengolah produk perikanan | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengolah produk perikanan | Pembentukan kelompok baru/pemula, kelompok mikro, dan kelompok kelas usaha | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | | Pembinaan perikanan budi daya | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Terlaksananya pembinaan perikanan budi daya bagi kelompok masyarakat | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |
| | | | Pengembangan kelembagaan masyarakat perikanan budi daya | Meningkatnya kapasitas masyarakat | Terfasilitasinya pembentukan badan hukum kelompok masyarakat budi daya perikanan | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

Perlindungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-159-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|------------------|---------|--|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Perlindungan nelayan dengan fasilitas asuransi perikanan | Terwujudnya perlindungan hak-hak nelayan kecil | Terlaksananya perlindungan nelayan mendapatkan fasilitas asuransi perikanan | Kementerian KP | Pemda Kab. Kapuas Hulu | |
| | | | Bantuan pembangunan rumah nelayan | Terwujudnya bantuan bagi nelayan kecil | Terwujudnya bantuan pembangunan unit rumah khusus bagi nelayan | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Kementerian ATR/BPN, Kementerian KP | |
| | | | Pembentukan BUMDes | Terwujudnya lembaga ekonomi berbasis desa | Terbentuknya BUMDes | Pemda Kab. Kapuas Hulu | Pemda Kab. Kapuas Hulu | |
| 23. | Belum optimalnya | 5.4. | Pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan | Pembangunan jalan desa, jaringan Air bersih, dermaga | Terbangunnya infrastruktur | Terlaksananya pembangunan jalan desa, jaringan air | Kementerian Parekraf/ Baparekraf, | Pemda Kab. Kapuas Hulu |

infrastruktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-160-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|------------------------------------|---------|-------------------------|--|---------------------|--|------------------------|-----------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | infrastruktur kawasan Danau | | fasilitas kawasan Danau | penunjang pariwisata Danau, pondok wisata dan pusat informasi wisata | dasar kawasan Danau | bersih desa, dermaga, pondok wisata dan pusat informasi wisata | Pemda Kab. Kapuas Hulu | |

11. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-161-

11. DANAU LIMBOTO

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|----------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Provinsi Danau | Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun, ditetapkan dan disosialisasikan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo | Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian KP, Pemda Prov. Gorontalo |

Strategi 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-162-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkanannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Prov. Gorontalo | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, Pemda Prov. Gorontalo |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1 | Pengelolaan kualitas Air Danau | Penetapan Kelas Air Danau | Pemanfaatan Danau sesuai dengan peruntukan dan daya dukung | Ditetapkan dan diimplementasikannya | Kementerian LHK | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo |

daya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-163-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|--|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | daya tampung lingkungan | peraturan tentang Kelas Air | | |
| | | | | Penyusunan Perda Penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran Air | Pemanfaatan Danau sesuai dengan peruntukan dan daya dukung daya tampung lingkungan | Tersusun dan ditetapkannya Perda tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) Danau | Kementerian LHK | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo |
| | | | | Pemantauan kualitas Air | Pemanfaatan Danau sesuai dengan peruntukan dan daya dukung daya tampung lingkungan | Terlaksananya pemantauan kualitas Air secara lengkap, detail dan berkala, serta tersedianya data kualitas Air | Pemda Prov. Gorontalo | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo |

3.2. Pengamanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-164-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|--|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | 3.2. | Pengamanan dan perlindungan Ekosistem Danau | Patroli bersama terhadap kegiatan-kegiatan di Danau | Terkendalinya kegiatan yang tidak sesuai peruntukan ruang/perairan Danau (budi daya ikan dengan keramba jaring apung) | Terlaksananya kegiatan pengamanan Danau secara terpadu | Pemda Prov. Gorontalo | Kepolisian RI |
| | | 3.3. | Pengendalian pencemaran Air di perairan dan Daerah Tangkapan Air | Pengendalian pencemaran Air dari sumbernya | Tercapainya peningkatan status mutu Air dari eutrofik menjadi mesotrofik, dan kualitas Air menjadi sesuai persyaratan Kelas II | Terlaksananya pengendalian pencemaran Air dari sumbernya di perairan maupun Daerah Tangkapan Air Danau | Kementerian PUPR dan Kementerian LHK | Pemda Prov. Gorontalo |

Sosialisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-165-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|---|--|---|---|---|-----------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Sosialisasi keramba jaring apung ramah lingkungan | Berkurangnya beban pencemaran Air dari keramba jaring apung | Tersedianya keramba jaring apung ramah lingkungan | Pemda Prov. Gorontalo | Kementerian KP, LIPI, Pemda Prov. Gorontalo Universitas | |
| | | 3.4 | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo | Kementerian LHK, Pemda Prov. Gorontalo | |
| 4. | Banyaknya eceng gondok di Danau | 3.5. | Pengendalian eceng gondok | Pemanenan eceng gondok secara mekanik dengan kapal sedot | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Menurunnya luasan tutupan eceng gondok | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |
| 5. | Sedimentasi Danau | 3.6. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen Danau | Berkurangnya sedimen Danau dan meningkatnya | Terlaksananya pengerukan yang | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Gorontalo |

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-166-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|--------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | yang ramah lingkungan | kecerahan Air Danau | ramah lingkungan | | |
| 6. | Penataan lahan Sempadan Danau yang berdampak mencemari/ merusak Danau | 3.7. Penataan kawasan sempadan | Penentuan dan penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Pelaku Usaha |
| | | | Pemasangan patok batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan | Dipasanginya patok batas Sempadan Danau | Kementerian ATR/BPN dan Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |

lindung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-167-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|---|--|-----------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | lindung sesuai PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN | | | |
| | | | Pembangunan <i>greenbelt</i> di sekeliling Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung sesuai PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN | Terlaksananya pembangunan <i>greenbelt</i> sebagai batas vegetatif agar tidak terjadi penyempitan luasan Ekosistem Danau | Pemda Prov. Gorontalo | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo |
| | | | Pembangunan sarpras jalan di sekeliling Danau (<i>roadbelt</i>) | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana jalan (<i>road-belt</i>) sebagai infra- | Pemda Prov. Gorontalo | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo |

sebagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-168-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | sebagai kawasan lindung sesuai PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN | struktur batas agar tidak terjadi penyempitan luasan Ekosistem Danau | | |
| | | | Pembuatan tanggul dan jalan inspeksi di tepi Danau yang memperhatikan Ekosistem Danau | Mencegah erosi ke badan Danau serta mencegah okupasi lahan sempadan | Terlaksananya pembuatan tanggul dan jalan inspeksi | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Gorontalo |
| 7. | Tingginya potensi pencemaran di Daerah Tangkapan Air Danau | 3.8. Pengendalian pencemaran di Daerah Tangkapan Air Danau | Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di sekitar Danau dan Daerah Tangkapan Air Danau | Menurunnya beban pencemaran dari limbah rumah tangga dan industri di Daerah | Terbangunnya <i>septic tank</i> di wilayah pemukiman di dekat Danau | Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |

Tangkapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-169-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | Tangkapan Air Danau | | | | |
| | | | Pengawasan dan penertiban izin pembuangan Air limbah | Menurunnya beban pencemaran dari limbah kegiatan usaha di DTA Danau | Peningkatan kepemilikan izin dan ketaatan pembuangan Air limbah di Sempadan Danau | Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo | |
| 8. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 3.9. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Pembuatan sumur resapan untuk mengendalikan aliran permukaan | Terkendalnya aliran permukaan | Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan biopori | Kementerian LHK, Kementerian PUPR | Pemda Prov. Gorontalo |
| | | | Penanaman di lahan kritis | Penurunan luas lahan kritis hingga 50% dalam 5 tahun | Dilaksanakannya penanaman lahan kritis dalam 5 tahun | Kementerian LHK, dan Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo | |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-170-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|---|---|--|--|---|-----------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Pembangunan sarana dan prasarana pengendali sedimen | Berkurangnya sedimentasi | Terbangunnya <i>check dam</i> pengendali sedimen | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo | |
| | | | Pembangunan dam penahan (<i>ground sill</i>) | Berkurangnya wilayah banjir | Terbangunnya dam penahan per tahun | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo | |
| | | 3.10. | Pengendalian sedimentasi dan banjir secara infrastruktur pekerjaan umum | Pengembalian kapasitas dan fungsi sungai yang mengarah ke Danau | Berkurangnya sedimentasi di Danau | Terlaksananya kegiatan pengembalian kapasitas dan fungsi sungai yang bermuara ke Danau | Kementerian LHK, Kementerian PUPR dan Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-171-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|--|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | |
| 9. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaru | 4.1. Pengembangan sistem informasi Danau | Pembuatan basis data dan sistem informasi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau antara lain batimetri, neraca Air, kualitas Air, keanekaragaman hayati, kondisi Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air Danau, serta sosial ekonomi | Pemda Prov. Gorontalo | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, LIPI, Pemda Prov. Gorontalo |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | |
| 10. | Perlu dikembangkannya kelembagaan dan ditingkatkannya peran para pihak | 5.1. Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan Danau | Pembentukan forum komunikasi para pihak | Meningkatnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan Danau | Terbentuknya forum komunikasi para pihak | Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |

5.2. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-172-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | 5.2. Peningkatan pemahaman para pihak | Sosialisasi pengelolaan Danau kepada para pihak termasuk pengambil kebijakan | Meningkatnya pemahaman para pihak | Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan Danau setiap tahun | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |
| | | 5.3. Pengembangan ekowisata Danau | Pembangunan kawasan wisata Danau ramah lingkungan | Terwujudnya wisata ramah lingkungan | Terbangunnya kawasan wisata Danau ramah lingkungan | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo, Universitas |
| | | 5.4. Pengembangan Ekonomi Kreatif | Pemanfaatan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Terbangunnya UMKM pengolah eceng gondok | Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |

Pembentukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-173-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | Pembentukan unit usaha pembuat batu bata/batako dari sedimen | Berkurangnya sedimen Danau dan terciptanya usaha masyarakat | Tebentuknya usaha pembuatan batu bata/batako dari sedimen | Pemda Prov. Gorontalo | Pemda Prov. Gorontalo |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-174-

12. DANAU POSO

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|---|---|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Optimalisasi Penataan Ruang Kawasan Danau | Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dengan menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | Pemanfaatan ruang sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup | Tersusun, disosialisasikan dan diimplementasi-kannya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Pemda Sulawesi Tengah | Pemda Sulawesi Tengah, Kementerian ATR/BPN |
| | | | | Penyusunan zonasi badan air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi-kannya zonasi | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, |

badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-175-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | badan Air dan Sempadan Danau | | Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Sulawesi Tengah | Prov. Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |

3. Belum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-176-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| 3. | Belum tertatanya pemanfaatan Air | 2.2. Penataan pemanfaatan Air | Penyusunan <i>masterplan</i> penataan pemanfaatan Air Danau (termasuk studi kelayakan PLTA yang memperhatikan Ekosistem, dan studi penyediaan Air baku) dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah | Tertatanya pemanfaatan Air | Tersusun dan disosialisasikan-nya <i>masterplan</i> penataan pemanfaatan Air Danau | Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kementerian LHK, Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Pelaku Usaha |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | |
| 4. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. Pengelolaan kualitas Air Danau | Pemantauan kondisi kualitas Air Danau | Tersedianya acuan pengelolaan dan perbaikan | Dilaksanakannya pemantauan | Pemda Sulawesi Tengah | Kementerian LHK, LIPI |

kualitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-177-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | kualitas Air Danau | kualitas Air secara berkala | | |
| | | | Penyediaan/ pembangunan sarana dan prasarana atau teknologi pemulihan kualitas Air Danau | Perbaikan kualitas Air Danau | Tersedianya sarana prasarana untuk Pengelolaan Kualitas Air | Pemda Sulawesi Tengah | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| | | Pengendalian eceng gondok | Pemanenan eceng gondok secara mekanik/fisik | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Menurunnya luasan tutupan eceng gondok | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| | | 3.2. Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |

Tengah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-178-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | | Tengah, Pelaku Usaha | |
| 5. | Sedimentasi Danau | 3.3. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen danau yang ramah lingkungan | Berkurangnya pendangkalan danau | Terlaksananya pengerukan sedimen secara ramah lingkungan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| | | | | Pemanfaatan sedimen yang ramah lingkungan | Meningkatnya volume tampung perairan danau | Termanfaatkannya sedimen dengan baik | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| 6. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.4. | Pelestarian keanekaragaman hayati | Penertiban penangkapan ikan asli/endemik | Meningkatnya kelestarian ikan asli/endemik | Terwujudnya instrumen penertiban penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan | Pemda Sulawesi Tengah | Kementerian KP, LIPI, Pemda Prov. Sulawesi Tengah, Universitas |

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-179-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|--------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pengembangan benih dan <i>restocking</i> (penebaran bibit) ikan asli/endemik | Peningkatan populasi ikan asli/endemik | Dilaksanakannya <i>restocking</i> ikan asli/endemik | LIPI, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kementerian KP, Kementerian LHK, LIPI, Universitas |
| | | | Pelarangan penebaran benih ikan/ikan (introduksi) spesies asing invasif | Meningkatnya ikan asli/endemik dan berkurangnya ikan spesies asing | Dilaksanakannya pelarangan penebaran benih ikan/ikan (introduksi) spesies asing invasif | LIPI, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kementerian KP, Kementerian LHK, LIPI, Universitas |
| 7. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berpotensi mencemari/ merusak danau | 3.5. Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |

sebagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-180-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|--|---|---------------------------|---|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | sebagai kawasan lindung | | | |
| 8. | Masih tingginya Lahan kritis, erosi, sedimentasi, banjir dan pencemaran dari Sempadan Danau/Daerah Tangkapan Air | 3.6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif | Penanaman lahan kritis di | Berkurangnya lahan kritis | Dilaksanakannya Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| | | 3.7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan sipil teknis dan pembangunan infrastruktur pengendali erosi/sedimentasi dan banjir | Pembuatan bangunan sipil teknis pengendali erosi meliputi <i>gully plug</i> , turap/beronjong pelindung tebing, dam | Penurunan laju erosi | Dilaksanakannya pembuatan bangunan pengendali erosi | Kementerian LHK | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |

penahan/ ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-181-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | penahan/ <i>check dam</i> dan dam pengendali yang ramah lingkungan | | | | |
| | | | Pelaksanaan pengukuran dan analisis debit dan laju sedimentasi | Penurunan laju erosi dan sedimentasi | Tersedianya data acuan penurunan laju erosi | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| | | | Pembangunan tanggul penahan sedimen | Penurunan laju erosi dan sedimentasi | Terbangunnya tanggul pengendali | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| | | | Pembuatan embung, dam parit, sumur resapan dan lubang biopori | Penurunan laju alir dan potensi banjir | Terbangunnya embung, dam parit, sumur resapan dan lubang biopori | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Pemda Prov. Sulawesi Tengah |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-182-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|-------------------------------|--|--|---|---------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 9. | Perlu ditingkatkannya pemantauan, evaluasi serta basis data dan sistem informasi | 4.1. | Pemantauan Air Danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau. | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau antara lain batimetri, neraca Air, kualitas Air, keanekaragaman hayati, kondisi Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air Danau, serta sosial ekonomi. | Pemda Sulawesi Tengah | Prov. Kementerian LHK, Kementerian PUPR, LIPI, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |
| | | 4.2. | Pengembangan sistem informasi | Pembuatan <i>database</i> dan sistem informasi Danau | Tersedianya kemudahan akses informasi data Danau | Tersedianya sistem informasi Danau | Pemda Sulawesi Tengah | Prov. Pemda Sulawesi Tengah |
| | | | | Pengembangan sarana dan | Tersedianya data perkiraan dan | Tersedianya sarana dan | Kementerian Dikbudristek, | Kementerian PUPR, |

prasarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-183-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan Danau (arus balik/ <i>overtorn</i> , banjir) | peringatan bencana perairan Danau | prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana perairan Danau (arus balik/ <i>overtorn</i> , banjir) | BRIN, LIPI, BPPT, BIG, BPS | Kementerian LHK, BNPB, Universitas |
| | | | Studi keanekaragaman hayati dan penangkapan ikan ramah lingkungan | Tersedianya acuan pelestarian keanekaragaman hayati dan pola penangkapan ikan yang tepat | Terlaksananya studi keanekaragaman hayati dan perikanan secara komprehensif dan berkala | Kementerian LHK dan Kementerian KP | Pemda Prov. Sulawesi Tengah, Universitas |
| | | | Penyusunan status mutu Air Danau Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 | Kualitas Air Danau sesuai peruntukan dan daya dukung daya tampung lingkungan | Tersusunnya status mutu Air Danau | Pemda Prov. Sulawesi Tengah, LIPI dan Kementerian LHK | Pemda Prov. Sulawesi Tengah |

tentang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-184-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air | | | | | |
| | | | Studi revitalisasi Danau (analisis tipe sedimen) | Terkendalinya pengelolaan sedimentasi | Tersedia kajian revitalisasi Danau terkait khususnya acuan untuk pengelolaan sedimen | Kementerian PUPR, LIPI | Universitas, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | |
| | | 4.3. | Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Danau secara berkala | Terlaksananya pengendalian yang efektif untuk pencapaian tujuan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelamatan Danau secara komprehensif dan berkala | Pemda Sulawesi Tengah | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-185-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--|---------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | Penyelamatan Danau | | | Sulawesi Tengah |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 10. | Perlu dikembangkan-nya kelembagaan pengelolaan Danau dan ditingkatkannya peran para pihak | 5.1. | Pengembangan kelembagaan Penyelamatan Danau | Pembentukan kelembagaan yang efektif | Meningkatnya sinergi dan koordinasi penyelamatan Danau | Terbentuknya kelembagaan dan koordinasi penyelamatan Danau yang efektif | Kemendagri, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kementan, Kementerian Parekraf/ Baparekraf, Kementerian ESDM, Kementerian KP, Universitas |
| | | 5.2. | Peningkatan peran serta masyarakat | Pembentukan, sosialisasi dan pembinaan kelompok masyarakat | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelamatan Danau | Terbentuknya kelompok masyarakat yang mendukung | Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Pemda Prov. Sulawesi Tengah, Universitas |

penyelamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-186-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | penyelamatan Danau | | penyelamatan Danau | | |
| | | 5.3. Pengembangan pariwisata Danau ramah lingkungan | Penyusunan konsep wisata Danau ramah lingkungan | Meningkatnya peran serta dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata | Tersusunnya konsep wisata Danau ramah lingkungan, terbina dan terlibatnya masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana wisata, serta terlaksananya promosi wisata Danau | Kementerian Parekraf/ Baparekraf, Pemda Prov. Sulawesi Tengah | Kemendagri, Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian PUPR, Kemenperin, Kemenhub |
| | | 5.4. Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan | Pembinaan penangkapan ikan ramah lingkungan | Perikanan tangkap berkelanjutan yang memberi | Dilaksanakannya pembinaan perikanan | Pemda Sulawesi Tengah | Kementerian KP, Pemda Prov. Sulawesi Tengah |

nilai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-187-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | nilai ekonomi dan pelestarian lingkungan Danau | tangkap secara berkala | | |
| | | 5.5. Pengembangan pertanian yang menerapkan prinsip konservasi tanah dan Air | Penyuluhan pertanian yang menerapkan pola teras dan rorak serta menggunakan bahan organik | Berkurangnya Sedimen Danau dan beban pencemaran yang masuk ke Danau | Telaksananya pelatihan penerapan pertanian berprinsip Konservasi Tanah dan Air | Pemda Sulawesi Tengah | Prov. Kementerian LHK |

13. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-188-

13. DANAU TEMPE

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|----------------|---|---|---|------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan terjadinya konflik pemanfaatan ruang | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi-kannya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Pemda Sulawesi Selatan | Prov. Sulawesi Selatan |
| | | | | Penyusunan zonasi pemanfaatan Ekosistem | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan | Pemda Sulawesi Selatan | Prov. LIPI, Pemda Sulawesi |

perairan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-189-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|---|---|------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | perairan Danau (untuk perlindungan maupun pemanfaatan) | tampung Lingkungan Hidup | diimplementasi-kannya zonasi perairan Danau | | Selatan, Universitas, |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

Strategi 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-190-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Sulawesi Selatan | Prov. Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. | Pengelolaan kualitas Air Danau | Penetapan baku mutu dan status trofik Air Danau | Dicapainya kualitas Air yang baik dan pemanfaatan Danau sesuai dengan daya dukung daya | Ditetapkan dan diimplementasikannya baku mutu dan status trofik Air sebagai acuan | Kementerian LHK, Pemda Sulawesi Selatan | Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

tampung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-191-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | tampung lingkungan (saat ini Danau berada dalam kondisi eutrofik sampai hipereutrofik, serta kekeruhan dan kandungan <i>Total Suspended Solid</i> (TSS) yang tinggi) | pengelolaan Danau | | |
| | | | Penyediaan sarana prasarana pemantauan kualitas Air | Tersedianya sarana prasarana pemantauan kualitas Air yang baik | Dukungan penyediaan sarana prasarana pemantauan kualitas Air | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Universitas |
| | | 3.2. | Pengendalian eceng gondok | Pemanenan eceng gondok secara mekanik/fisik | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Menurunnya luasan tutupan eceng gondok | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-192-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|----------------------------------|--|---|--|------------------------------|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | Kementerian LHK | | |
| 4. | Sedimentasi Danau | 3.3. | Pengendalian sedimentasi | Pengerukan sedimen Danau yang memperhatikan Ekosistem | Berkurangnya sedimentasi di Danau dan meningkatnya volume tampung Air Danau | Terlaksananya pengerukan Danau | Kementerian PUPR | LIPI, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |
| 5. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.4. | Pelestarian spesies asli/endemik | Penyusunan dan penetapan regulasi pelarangan penangkapan ikan dengan alat destruktif | Lestarnya spesies asli/endemik | Tersusun dan diimplementasikannya regulasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang sesuai | Pemda Sulawesi Selatan Prov. | Kementerian KP, LIPI, Universitas, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-193-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----------|---|---------|---|---|--|---|--|------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Pembangunan reservat pada zona konservasi ikan asli/endemik Danau | Lestarnya spesies asli/endemik | Dibangunnya reservat ikan asli/endemik | Pemda Sulawesi Selatan | Prov. Kementerian KP, LIPI, Universitas | |
| | | | <i>Restocking</i> ikan asli/endemik | Lestarnya spesies asli/endemik | Terlaksananya <i>restocking</i> ikan asli/endemik | Pemda Sulawesi Selatan | Prov. Kementerian KP, LIPI, Universitas | |
| | | | Pelarangan penebaran benih ikan/ikan (introduksi) spesies asing invasif | Lestarnya spesies asli/endemik | Terlaksananya pelarangan penebaran benih ikan /ikan (introduksi) spesies asing invasif | Pemda Sulawesi Selatan | Prov. Kementerian KP, LIPI, Universitas | |
| 6. | Belum tertatanya pemanfaatan Danau | 3.5. | Penataan pemanfaatan Danau | Pelaksanaan kajian, penyusunan dan implementasi peraturan | Tertatanya pemanfaatan Air dengan memperhatikan Ekosistem | Dilaksanakannya kajian, serta disusun dan diimplementasi-kannya | Kementerian PUPR, Pemda Sulawesi Selatan | Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-194-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | pemanfaatan Air (untuk PDAM, irigasi dan lainnya) yang memperhatikan Ekosistem | | peraturan pemanfaatan Air Danau | | |
| | | | | Penetapan Nilai Standar Jasa Lingkungan Pemanfaatan Air bagi PDAM dan irigasi | Terbangunnya peran para pihak dalam menjaga kelestarian sumber Air | Ditetapkan dan diimplementasi-kannya jasa lingkungan pemanfaatan Air bagi PDAM dan irigasi | Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |
| 7. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berpotensi | 3.6. | Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

mencemari ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-195-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|-----------------------------|---------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | mencemari/ merusak Danau | | | sebagai kawasan lindung | | | |
| | | | Pembangunan <i>greenbelt</i> dengan penanaman vegetasi di sekeliling Danau | Mencegah erosi ke Danau, meningkatkan resapan air, serta agar pemanfaatan sempadan memperhatikan batas dan fungsinya | Terlaksananya pembangunan <i>greenbelt</i> | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Selatan, Universitas | Kepolisian RI, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |
| | | | Pembuatan tanggul dan jalan inspeksi di tepi Danau yang memperhatikan Ekosistem Danau | Mencegah erosi ke badan Danau serta mencegah okupasi lahan Sempadan Danau | Terlaksananya pembuatan tanggul dan jalan inspeksi | Kementerian PUPR | Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

8. Pencemaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-196-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 8. | Pencemaran dari sumber-sumber limbah di sekitar Danau | 3.7. | Pengendalian pencemaran air dari kegiatan di sekitar Danau | Penerapan pertanian organik | Berkurangnya beban pencemaran ke Danau | Diterapkannya pertanian organik di sekitar Danau | Pemda Sulawesi Selatan | Pemda Sulawesi Selatan, Universitas |
| | | | | Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah komunal dan jamban keluarga | Berkurangnya beban pencemaran ke Danau | Terbangunnya Instalasi Pengelolaan Air Limbah komunal | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |
| | | | | Penertiban izin usaha di sekitar Danau | Meningkatnya kepatuhan usaha di sekitar Danau dalam pengendalian pencemaran | Kegiatan usaha di sekitar danau mematuhi perizinan | Pemda Sulawesi Selatan | Pemda Sulawesi Selatan |

9. Banyaknya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-197-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|--|---------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| 9. | Banyaknya sampah di sekitar Danau | 3.8. | Pengelolaan sampah | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Selatan |
| 10. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 3.9. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah Tangkapan Air Danau | Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan vegetatif atau reboisasi | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan (laju penurunan luasan Danau saat ini sebesar 1,48 km ² per tahun, sehingga laju penurunan luas Danau dalam kurun waktu 25 tahun (1989 - 2015) | Terlaksananya reboisasi di lahan kritis di Daerah Tangkapan Air Danau (luas lahan kritis saat ini mencapai 128.174,82 hektar atau sebesar 45,15% dari luas Daerah Tangkapan Air; dimana 17,37% | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

mencapai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-198-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|-------------------------------|--|---|------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | mencapai ± 19,972,68 Hektar) | Daerah Tangkapan Air atau 49.309,36 hektar merupakan lahan dengan kepekaan erosi berat dan sangat berat; dimana 72,57% lahan Daerah Tangkapan Air atau seluas 141.816,85 hektar merupakan Areal Penggunaan Lain) | | |
| | | | Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sipil teknis dengan | Berkurangnya aliran permukaan | Terlaksananya pembuatan embung, sumur | Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Pemda Prov. Sulawesi Selatan |

pembuatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-199-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|---|---|---|--|------------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | pembuatan embung, sumur resapan dan lubang biopori | | resapan dan lubang biopori | | |
| 11. | Pencemaran dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertanian yang tidak ramah lingkungan | 3.10. | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Penerapan pertanian yang menerapkan prinsip Konservasi Tanah dan Air antara lain dengan pola terasering dan menggunakan pupuk organik | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan, serta berkurangnya buangan bahan kimia ke perairan | Terlaksananya pertanian ramah lingkungan di sekitar Danau | Pemda Sulawesi Selatan | Pemda Sulawesi Selatan |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 12. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaharui | 4.1. | Pengembangan sistem informasi Danau | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi danau antara lain batimetri, neraca | Pemda Sulawesi Selatan | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, LIPI, Pemda Prov. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-200-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | Air, kualitas Air, keanekaragaman hayati, kondisi Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air Danau, serta sosial ekonomi | | Sulawesi Selatan |
| | | | | Pengembangan sistem informasi | Pembuatan <i>database</i> dan sistem informasi Danau | Tersedianya kemudahan akses informasi data Danau | Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Pemda Prov. Sulawesi Selatan |
| | | | | Pengembangan sarana dan prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana banjir | Tersedianya data perkiraan dan peringatan bencana banjir | Tersedianya sarana prasarana sistem pemantauan dan peringatan dini bencana banjir | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, BPPT, BIG, BPS | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BNPB, Universitas |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-201-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|---|---------|---|--|--|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 13. | Perlu dikembangkan-nya kelembagaan dan ditingkatkannya koordinasi dan peran para pihak | 5.1. | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan Danau | Penetapan komitmen dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan Danau (antar Kabupaten di Kawasan Danau Tempe: Wajo, Sidrap dan Soppeng) | Meningkatnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan Danau | Terwujudnya komitmen para pihak dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Danau | Pemda Sulawesi Selatan | Pemda Sulawesi Selatan |
| | | 5.2. | Peningkatan pemahaman para pihak | Sosialisasi pengelolaan Danau kepada para pihak | Meningkatnya pemahaman para pihak | Terlaksananya kegiatan sosialisasi setiap tahun | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Pemda Sulawesi Selatan, Universitas |

5.3. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-202-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--------------|---------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | 5.3. | Pengembangan wisata Danau | Pegembangan wisata Danau berbasis masyarakat dan kearifan lokal dan penetapannya dalam kalender tahunan Festival Danau | Lestarnya Ekosistem Danau dan terciptanya usaha bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat | Terwujudnya wisata yang ramah lingkungan, mengangkat kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat | Kementerian PUPR, Kementerian Parekraf/ Baparekraf, Kementerian LHK, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Pemda Prov. Sulawesi Selatan, Universitas |
| | | 5.4 | Pemanfaatan eceng gondok dan sedimen Danau yang bernilai ekonomi | Pemanfaatan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok dan terciptanya usaha masyarakat | Terbangunnya usaha masyarakat pengolah eceng gondok | Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Pemda Prov. Sulawesi Selatan |
| | | | | Pemanfaatan sedimen Danau yang bernilai ekonomi tinggi | Berkurangnya sedimen Danau dan terciptanya | Tebentuknya usaha masyarakat | Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian |

usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-203-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | usaha masyarakat | pengolah sedimen Danau | | Parekraf/ Baparekraf |
| | | 5.5. Peningkatan peran Pemangku Kepentingan | Pelaksanaan kajian sosial ekonomi masyarakat (potensi dan dampak) dan kajian kearifan lokal dalam penyelamatan Ekosistem Danau | Tersedianya bahan peningkatan peran masyarakat | Terlaksananya kajian sosial ekonomi masyarakat dan Kajian kearifan lokal dalam penyelamatan Ekosistem Danau | Universitas, Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Kementerian LHK, Kemenko Perekonomian, LIPI, Kementerian Dikbudristek, BRIN, Universitas |
| | | | Pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelompok masyarakat dalam penyelamatan Danau (pertanian ramah lingkungan, | Meningkatnya peran masyarakat | Terlaksananya pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kelompok masyarakat | Pemda Prov. Sulawesi Selatan | Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Parekraf/Baparekraf, Pemda Prov. |

pengolahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-204-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | pengolahan sampah, ekowisata berbasis masyarakat dan budaya sadar wisata ramah sosial dan lingkungan) | | | | Sulawesi Selatan, Universitas |
| | | | Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) | Meningkatnya peran masyarakat | Terlaksananya pengembangan dan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) | Pemda Sulawesi Selatan | Kementerian LHK, Kemendag |
| | | | Pelaksanaan kegiatan lingkungan dari kegiatan usaha dan satuan pendidikan | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksananya kegiatan lingkungan dari kegiatan usaha dan satuan pendidikan | Kementerian LHK, Pemda Sulawesi Selatan, Universitas | Kementerian Dikbudristek, BRIN |

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-205-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif masyarakat | Meningkatnya peran para pihak dan terciptanya usaha masyarakat | Terlaksananya pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif masyarakat | Pemda Sulawesi Selatan, Otorita Tempe | Prov. Danau Kementerian Parekraf/Baparekraf |
| | | | Pengembangan Desa Wisata, Penyediaan sarana prasarana pariwisata dan Promosi Pariwisata Danau | Meningkatnya peran para pihak dan terciptanya usaha masyarakat | Pengembangan Desa Wisata, penyediaan sarana prasarana pariwisata di obyek wisata, dan kegiatan Promosi Pariwisata Danau | Pemda Sulawesi Selatan, Otorita Tempe | Prov. Danau Kementerian Parekraf/Baparekraf, Kementerian PUPR, Pelaku Usaha |

14. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-206-

14. DANAU MATANO

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|----------------|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup | Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur |
| | | | | Penyusunan zonasi pemanfaatan Ekosistem perairan danau (untuk perlindungan maupun pemanfaatan) | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi-kannya zonasi perairan Danau | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur |

Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-207-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkannya zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, Pemda Kab. Luwu Timur | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, |

Pemda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-208-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|--------------------------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | | Pemda Kab. Luwu Timur | |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. | Pengelolaan kualitas Air Danau | Penetapan baku mutu dan status trofik Air Danau | Dipertahankan-nya kualitas Air yang baik dan pemanfaatan Danau sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan | Ditetapkan dan diimplementasi-kannya baku mutu dan status trofik Air sebagai acuan pengelolaan Danau | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Pemda Kab. Luwu Timur |
| | | 3.2 | Pengendalian pencemaran Air | Penertiban dan penegakan hukum terhadap perikanan budi daya dengan keramba jaring apung di Danau | Tertib dan berkurangnya jumlah keramba jaring apung hingga sesuai daya dukung dan | Tersosialisasi dan diimplementasi-kannya peraturan tentang perizinan dan desain | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian KP, LIPI, Pemda Kab. Luwu Timur, Universitas |

daya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-209-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | daya tampung Danau | keramba jaring apung | | |
| | | | Pengaturan transportasi Air ramah lingkungan | Berkurangnya pencemaran bahan bakar minyak/oli ke perairan Danau | Tersedianya percontohan kapal motor ramah lingkungan | Kemenhub | Kementerian KP, Pemda Kab. Luwu Timur |
| | | | Pembangunan sarana drainase pengolahan air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Pemda Kab. Luwu Timur, Pelaku Usaha |
| | | | Pembersihan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Dilaksanakannya pembersihan eceng gondok | Kementerian PUPR | Kementerian KP, Kementerian LHK, Pemda |

Kab. Luwu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-210-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|----|--|---------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | | Kab. Luwu Timur | |
| 4. | Adanya material padat/sedimen yang masuk ke Danau | 3.3. | Pengendalian sedimentasi | Pembangunan kolam pengendapan pada lahan pasca tambang | Terkendalinya sedimentasi yang masuk ke Danau | Terbangunnya kolam pengendapan pada lahan pasca tambang | Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur, Pelaku Usaha |
| | | | Penerapan pertanian ramah lingkungan | Penerapan pertanian ramah lingkungan | Terkendalinya limpasan sisa-sisa pupuk kimia dan penggunaan pupuk kimia | Terwujudnya penerapan pertanian terasering dan pengembangan pemanfaatan pupuk organik | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementan, Kementerian LHK |
| 5. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.4. | Pelestarian spesies asli/endemik | Pembudi daya dan penebaran benih ikan/ ikan spesies endemik Danau | Terwujudnya pelestarian spesies endemik perairan Danau | Jumlah spesies endemik yang meningkat | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian KP, Kementerian LHK, LIPI, Universitas |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-211-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pembangunan reservat pada zona konservasi ikan asli/endemik Danau | Berkembangnya populasi ikan asli/ endemik Danau | Tersedia dan terjaganya habitat alami ikan | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian KP, LIPI, Pemda Kab. Luwu Timur, Universitas |
| | | | Penebaran ikan (<i>restocking</i>) ikan asli/endemik Danau dan pelarangan penebaran ikan (introduksi) spesies asing invasif | Terwujudnya kelestarian spesies asli/endemik dan pelarangan penebaran ikan (introduksi) spesies asing invasif di Danau | Tersedianya benih ikan lokal/endemik untuk penebaran kembali (<i>restocking</i>) dan budi daya | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian KP, LIPI, Pemda Kab. Luwu Timur, Universitas |
| | | | Penertiban perdagangan ikan endemik | Terwujudnya kelestarian spesies asli/endemik di Danau | Tersedianya pengaturan dan pembatasan perdagangan ikan endemik | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian KP, LIPI, Kementerian LHK, Universitas, |

Pemda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-212-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|--------------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | | | Pemda Kab. Luwu Timur |
| 6. | Pemanfaatan Danau yang tidak tertata | 3.5. Penataan pemanfaatan Danau | Pelaksanaan kajian, penyusunan dan implementasi peraturan pemanfaatan Danau | Tercapainya keseimbangan hidrologi dengan segala bentuk pemanfaatan Air Danau | Terwujudnya implementasi pemanfaatan danau dengan memperhatikan Ekosistem | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur |
| | | | Penetapan nilai standar jasa lingkungan pemanfaatan Danau /Air Danau | Terwujudnya standar tata kelola dan penetapan jasa lingkungan atas pemanfaatan Air Danau | Terwujudnya kontribusi jasa lingkungan dalam rangka mendukung pengelolaan Danau | Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur |
| 7. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berpotensi | 3.6. Penataan kawasan Sempadan Danau | Penetapan batas Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai dengan peraturan yang berlaku | Ditetapkannya batas Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, Pemda Kab. Luwu Timur, Pelaku Usaha |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-213-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | mencemari/ merusak Danau | | | | | | |
| | | | Pembangunan <i>greenbelt</i> dengan penanaman vegetasi di sekeliling Danau | Terjaganya kawasan Danau | Terlaksananya pembangunan <i>greenbelt</i> | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Kab. Luwu Timur |
| 8. | Pencemaran dari sumber-sumber limbah di sekitar Danau | 3.7. | Pengendalian pencemaran Air | Penerapan pertanian organik di sekitar Danau | Berkurangnya beban pencemaran yang masuk ke Danau | Terlaksananya pertanian organik di sekitar Danau | Pemda Kab. Luwu Timur, Universitas |
| | | | Pembangunan <i>septic tank</i> permukiman dan Instalasi Pengolahan Air | Berkurangnya beban pencemaran ke Danau | Terbangunnya <i>septic tank</i> permukiman dan Instalasi Pengolahan Air | Kementerian PUPR, Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Pemda Kab. Luwu Timur |

Limbah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-214-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|-----|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Limbah terpadu di sekitar Danau | | Limbah terpadu di sekitar Danau | | |
| 9. | Banyaknya sampah di sekitar Danau | 3.8. Pengelolaan sampah | Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah | Terkelolanya sampah | Terbangunnya unit pengolahan sampah plastik | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kemenperin, Kementerian PUPR |
| 10. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 3.9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan vegetatif atau reboisasi | Pemulihan lahan kritis akibat pembalakan dan pemanfaatan untuk pertanian/ perkebunan | Terlaksananya reboisasi di lahan kritis di Daerah Tangkapan Air Danau | Kementerian LHK, Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur |
| | | | Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sipil teknis dengan pembuatan dam | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan | Terlaksananya pembuatan dam penahan, gully plug, embung, sumur resapan | Kementerian LHK, Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur |

penahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-215-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|---|---------|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | penahan, <i>gully plug</i> , embung, sumur resapan dan lubang biopori | | dan lubang biopori | | | |
| 11. | Maraknya penebangan dan pembalakan liar | 3.10. | Pengendalian penebangan dan pembalakan liar | Pelaksanaan tata kelola dan pengawasan hutan | Berkurangnya pembalakan, penebangan dan pembukaan lahan ilegal atau secara tidak ramah lingkungan | Terlaksananya tata kelola dan pengawasan hutan | Kementerian LHK, Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur |
| 12. | Pencemaran dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertanian yang tidak ramah lingkungan | 3.11. | Pengembangan pertanian ramah lingkungan | Penerapan pertanian yang menerapkan prinsip Konservasi Tanah dan Air antara lain dengan pola terasering dan | Berkurangnya erosi dan aliran permukaan, serta berkurangnya buangan bahan kimia ke perairan Danau | Terlaksananya penerapan pertanian ramah lingkungan | Pemda Kab. Luwu Timur | Pemda Kab. Luwu Timur |

menggunakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-216-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|---|--|---------|-------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | menggunakan pupuk organik | | | | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 13. | Belum optimalnya pemantauan, evaluasi serta pengembangan data dan informasi | 4.1. | Pemantauan dan evaluasi | Monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Danau | Terlaksananya program penyelamatan Danau secara efektif dan efisien | Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR |
| | | | | Pemantauan kualitas Air | Tersedianya data dan informasi kualitas Air bagi acuan pengelolaan | Dilaksanakannya pemantauan kualitas Air secara berkala | Pemda Kab. Luwu Timur, Perum Jasa Tirta | Kementerian LHK, LIPI, Universitas |
| | | | | Penyediaan sarana dan prasarana | Tersedianya sarana dan prasarana pe- | Dukungan penyediaan sarana dan pra-sarana | Kementerian Dikbudristek, BRIN, LIPI, Kementerian | Kementerian LHK, Universitas |

pemantauan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-217-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|-------------------------|---------|-------------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | pemantauan kualitas Air | mantauan kualitas Air yang baik | pemantauan kualitas Air | PUPR, Pemda Kab. Luwu Timur | | |
| | | 4.2. | Pengembangan sistem informasi Danau | Pengumpulan data dan informasi, penyajian data dan informasi (uraian, tabular maupun peta) serta pembuatan <i>database</i> dan sistem informasi pengelolaan Danau | Tersajinya data dan terbangunnya sistem informasi | Dilaksanakannya pengumpulan data dan informasi, penyajian data serta pembangunan <i>database</i> dan sistem informasi pengelolaan Danau | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Kab. Luwu Timur | Universitas |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 14. | Peningkatan mata | 5.1. | Pengembangan wisata Danau | Pengembangan wisata Danau berbasis masyarakat dan | Terwujudnya pelestarian Ekosistem Danau dan terciptanya | Terwujudnya wisata Danau yang ramah lingkungan, | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, |

pencaharian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-218-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|-----|---|---------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | pencapaian masyarakat | | kearifan lokal dan penetapannya dalam kalender tahunan Festival Danau | usaha bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat | mengangkat kearifan lokal, mensejahterakan masyarakat | | Kemenperin, Kemendag, Universitas, Pemda Kab. Luwu Timur | |
| 15. | Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan Danau | 5.2. | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan Danau | Penetapan komitmen dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan Danau | Meningkatnya koordinasi para pihak dalam pengelolaan Danau | Terwujudnya komitmen para pihak dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Danau | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR |
| | | 5.3. | Peningkatan pemahaman para pihak | Sosialisasi pengelolaan Danau kepada para pihak | Meningkatnya pemahaman para pihak | Terlaksananya kegiatan sosialisasi setiap tahun | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR |
| | | | | Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan berkala | Meningkatnya kepedulian dan | Terlaksananya kegiatan pengelolaan | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, |

pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-219-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|--|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | pengelolaan danau antara lain bersih-bersih Danau bersama masyarakat dan instansi terkait | keterlibatan para pihak | Danau bersama secara berkala | | Kementerian PUPR |
| | | 5.4. Pelibatan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan Danau | Pembentukan dan pembinaan forum masyarakat adat pencinta Danau | Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga adat | Terlaksananya pembentukan dan pembinaan forum masyarakat adat pencinta Danau | Pemda Kab. Luwu Timur | Kementerian LHK, Kementerian PUPR |

15. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-220-

15. DANAU SENTANI

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|---|---|---------|----------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1. | Belum tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dan Zonasi Perlindungan dan Pemanfaatan Danau | Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Tersusun, ditetapkan, disosialisasikan dan diimplementasi-kannya Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dan zonasi Danau | Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Pemda Prov. Papua | Pemda Prov. Papua |
| | | | | Penyusunan zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Tertatanya perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi Ekosistem Danau | Tersusun dan ditetapkannya zonasi badan Air dan Sempadan Danau | Kementerian PUPR | Kementerian LHK, Kementerian KP, Kementerian ATR/BPN, |

Pemda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-221-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | | | | Pemda Prov. Papua | |
| Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | |
| 2. | Program kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | 2.1. | Pengintegrasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Pengintegrasian penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam dokumen perencanaan | Terintegrasinya program kegiatan penyelamatan Danau ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan | Ditetapkannya RPJMD dan RKPD yang telah mengintegrasikan upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Pemda Papua Prov. | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/ Bappenas, Pemda Prov. Papua |
| | | 2.2. | Penyusunan kebijakan Penyelamatan | Penyusunan Rancangan Peraturan dan Standar Pedoman | Pengelolaan Kawasan sesuai dengan standar kesehatan | Tersedianya Peraturan dan Standar Pedoman Kriteria Bidang | Kementerian PUPR, Kementerian LHK | Pemda Prov. Papua, Universitas |

Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-222-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|------------------|------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | Danau Prioritas Nasional | Kriteria Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman | lingkungan permukiman | Penyehatan Lingkungan Permukiman | | |
| Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau | | | | | | | |
| 3. | Menurunnya kualitas Air Danau | 3.1. Pengelolaan kualitas Air Danau | Pemantauan kualitas Air | Tersedianya data dan informasi kualitas Air bagi acuan pengelolaan | Dilaksanakannya pemantauan kualitas Air secara berkala | Pemda Papua | Prov. LHK, LIPI, Universitas |
| | | 3.2. Pengendalian pencemaran Air | Pengendalian kegiatan di perairan Danau melalui proses perizinan, pengawasan dan penertiban | Dipertahankannya kualitas Air yang baik (cemar ringan) dan pemanfaatan Danau sesuai dengan daya dukung daya | Pengendalian perizinan, pengawasan dan penertiban | Pemda Papua | Prov. Pemda Papua |

tampung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-223-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---------|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | | tampung lingkungan | | | |
| | | | | Pembersihan eceng gondok | Berkurangnya tutupan eceng gondok | Dilaksanakannya pembersihan eceng gondok | Kementerian PUPR | Pelaku usaha |
| | | 3.3. | Pengendalian pencemaran Air dari berbagai sumber di sekitar Danau | Pembangunan sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terkelolanya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Terlaksananya sarana drainase pengolahan Air limbah domestik dan persampahan | Kementerian PUPR, Pemda Prov. Papua | Kementerian LHK, Pemda Prov. Papua, Kementerian ESDM, Pelaku Usaha |
| 4. | Penurunan keanekaragaman hayati | 3.4. | Pelestarian spesies asli/endemik | Penangkaran dan penyebaran ikan endemik | Lestarnya ikan endemik | Terlaksananya penangkaran dan penyebaran ikan endemik | Pemda Prov. Papua | Kementerian KP, LIPI, Pemda Prov. Papua, Universitas |
| 5. | Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang | 3.5. | Penataan kawasan | Penetapan zonasi lahan Sempadan Danau dan | Pemanfaatan Sempadan Danau sesuai | Ditetapkannya zonasi lahan Sempadan | Kementerian PUPR | Kementerian ATR/BPN, |

tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-224-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|---|---------|----------------|--|---|--|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | tidak tertata, dan berpotensi mencemari/ merusak ekosistem Danau | | Sempadan Danau | penentuan Sempadan Danau | dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Danau dan penentuan garis Sempadan Danau | | Pemda Prov. Papua |
| | | | | Penertiban dan pengawasan bangunan dan kegiatan pemanfaatan Sempadan Danau | Pemanfaatan Sempadan Danau memperhatikan batas dan fungsinya sebagai kawasan lindung | Terwujudnya penertiban dan pengawasan bangunan dan kegiatan pemanfaatan Sempadan Danau | Pemda Papua | Prov. Papua |

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-225-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | | |
|----|---|---------|--------------------|---|--|--|------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | | Utama | | Pendukung | |
| | | | | Pembangunan <i>greenbelt</i> dengan penanaman dan pemeliharaan vegetasi di sekeliling Danau | Mencegah erosi ke Danau, meningkatkan resapan Air, serta pemanfaatan Sempadan Danau yang memperhatikan batas dan fungsinya | Terlaksananya pembangunan <i>greenbelt</i> | Pemda Papua | Prov. | Pemda Papua | Prov. |
| 6. | Banyaknya sampah di Danau dan sekitarnya | 3.6. | Pengelolaan sampah | Pembersihan sampah | Bersihnya kawasan sekitar Danau dari sampah | Terlaksananya paket pembersihan sampah di sekitar Danau | Pemda Papua | Prov. | Pemda Papua | Prov. |
| | | | | Pembinaan masyarakat dan fasilitasi pembersihan sampah dan | Bersihnya kawasan sekitar Danau dari sampah dan membaiknya | Terlaksananya pembinaan masyarakat dan fasilitasi kegiatan bersih-bersih | Kementerian LHK | | Pemda Papua | Prov. |

peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-226-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | peningkatan kualitas lingkungan hidup di sungai | kualitas lingkungan hidup di sungai | sampah dan peningkatan kualitas lingkungan di sungai yang bermuara ke Danau | | |
| 7. | Lahan kritis, erosi, banjir dan sedimentasi | 3.7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah Tangkapan Air Danau dan mempertahankan luas hutan minimal 30% DAS/DTA | Pelaksanaan RHL vegetatif atau reboisasi | Berkurangnya laju erosi dan terpulihkannya lahan (saat ini sekitar 90 ton atau \pm 5 m/thn sedimen masuk ke Danau) | Berkurangnya lahan kritis | Pemda Papua | Prov. Papua, Kementerian LHK |
| | | | Pembuatan bangunan konservasi tanah | Terkendalinya erosi di Daerah Tangkapan Air Danau | Terlaksananya pembangunan | Kementerian LHK, Kementerian PUPR | Pemda Papua |

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-227-

| No | Permasalahan | Program | | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|---|---|---------|--|--|--|---|--|-------------------------|
| | | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | | dan Air pengendali erosi | | | | |
| Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi | | | | | | | | |
| 8. | Keterbatasan data dan informasi Danau yang terbaru | 4.1. | Pemantauan dan evaluasi | Inventarisasi dan pemantauan kondisi Danau | Tersedianya data dan informasi sebagai acuan pengelolaan | Tersedianya data dan informasi kondisi Danau, meliputi antara lain: batimetri, neraca Air, keanekaragaman hayati, kondisi Sempadan Danau, Daerah Tangkapan Air Danau dan sosial ekonomi | Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemda Prov. Papua | Pemda Prov. Papua |
| | | 4.2. | Pengembangan basis data dan sistem informasi | Pengembangan Sistem Informasi Danau | Terlaksananya pengelolaan Danau yang | Terhimpunnya data dan informasi Danau yang | Pemda Papua | Prov. LIPI, Universitas |

terintegrasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-228-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | | |
|--|--|---------|---|---|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung | |
| | | | | terintegrasi lintas Pemangku Kepentingan | terbaharui, dan terinformasikan kepada para Pemangku Kepentingan | | | |
| Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 9. | Perlu dikembangkan-nya kelembagaan dan ditingkatkannya peran para pihak | 5.1. | Pengembangan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan Danau | Penyusunan Perda Provinsi tentang Lembaga Koordinasi Pengelolaan dan Penyelamatan Danau | Meningkatnya koordinasi dan kesepahaman para pihak dalam pengelolaan Danau | Tersusunnya dan diimplementasi-kannya Perda Kelembagaan Pengelolaan dan Penyelamatan Danau | Kementerian LHK, Pemda Prov. Papua | Pemda Prov. Papua |
| | | 5.2. | Peningkatan peran para pihak | Pembentukan Forum Daerah Aliran Sungai | Meningkatnya peran para pihak | Terbentuknya Forum Daerah Aliran Sungai | Kementerian LHK, Kementerian PPN/Bappenas, Pemda Prov. Papua | Pemda Prov. Papua |

Pembentukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-229-

| No | Permasalahan | Program | Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Target Capaian (2021-2024) | Penanggung jawab | |
|----|--------------|---------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Utama | Pendukung |
| | | | Pembentukan dan pembinaan kelompok pencinta Danau | Meningkatnya peran para pihak | Terbentuk dan terbinanya kelompok pencinta Danau pertahun | Kementerian LHK, Pemda Prov. Papua | Pemda Prov. Papua |
| | | | Pendidikan dan pelatihan penyelamatan Danau bagi masyarakat | Meningkatnya peran para pihak | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan penyelamatan Danau bagi masyarakat | Pemda Prov. Papua | Pemda Prov. Papua |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO